

**NILAI MANAJEMEN KEUANGAN ISLAM
PADA MANAJEMEN KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN SULA MALUKU UTARA
TAHUN 2016**

DISERTASI

**Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Mendapatkan Gelar Doktor dalam Program Ekonomi Syari'ah**



**Oleh : Nirwan Umasagi
NIM. F02314008**

**PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL
SURABAYA**

2018

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nirwan Umasugi

NIM : F0 231 4008

Program : Doktor (S-3)

Institusi : Pascasarjana UIN Sunan Ampel Surabaya

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa DISERTASI ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 7 Agustus 2017

Saya yang menyatakan

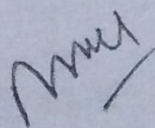


Nirwan Umasugi

PERSETUJUAN

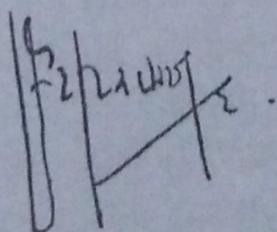
Disertasi Nirwan Umasugi ini telah disetujui
pada tanggal 11 September 2017

Oleh
Promotor,



Prof. Dr. H. Burhan Djamaluddin, MA

Promotor,

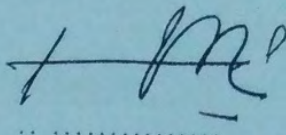
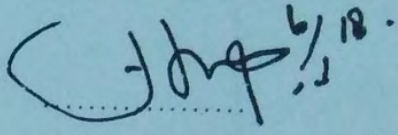
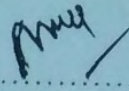
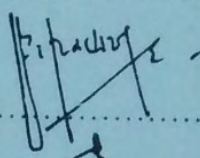
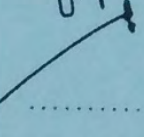
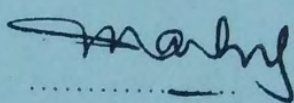


Dr. Hj. Fatmah, ST, MM

PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Disertasi An. Nirwan Umasugi telah diujikan pada ujian tahap Pertama
Hari/tanggal: Kamis, 14 Desember 2017 dan layak diujikan
Ke tahap terbuka

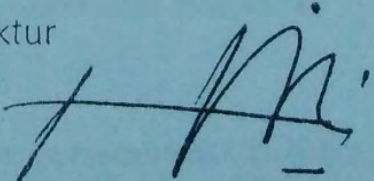
Tim Penguji:

- | | | |
|--|------------------|---|
| 1. Prof. Dr. H. Husein Aziz, M.Ag | Ketua |  |
| 2. Dr. H. Ah. Ali Arifin, MM | Sekretaris |  |
| 3. Prof. Dr. H. Burhan Djamaluddin, MA | Promotor/Penguji |  |
| 4. Dr. Hj. Fatmah, MM | Promotor/Penguji |  |
| 5. Prof. Dr. H. Babun Suharto, MM | Penguji Utama |  |
| 6. Prof. Masdar Hilmy, MA, Ph.D | Penguji |  |



Surabaya, Januari 2018

Direktur


Prof. Dr. H. Husein Aziz, M.Ag
NIP. 195601031985031002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Nirwan Umasgi
NIM : F02314008
Fakultas/Jurusan : Syariah/ Ekonomi Syariah
E-mail address : nirwanivan290@yahoo.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

✓ Disertasi Lain-lain (...)
yang berjudul :

Nilai Manajemen Keuangan Islam Pada Manajemen Keuangan Daerah

Kabupaten Kepulauan Sula Maluku Utara Tahun 2016

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya,

Penulis



(Nirwan Umasgi)

nama terang dan tanda tangan

3.15	Pembiayaan Daerah Kabupaten Kepulauan Sula	174
3.16	Proyeksi Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Sula (Ribuan Rupiah)	178
3.17	Proyeksi Pembiayaan dan Pembiayaan Wajib, Mengikat serta Prioritas Utama (Jutaan Rupiah) (Prioritas 1)	179
3.18	Proyeksi Kapasitas Kemampuan Keuangan Daerah untuk Mendanai Pembangunan Daerah Kabupaten Kepulauan Sula (Milyar Rupiah)	181
3.19	Alokasi Kapasitas Keuangan Daerah Berdasarkan Jenis Prioritas Tahun Anggaran 2016-2021 (Jutaan Rupiah)	183
3.20	Alokasi Kapasitas Keuangan Daerah Berdasarkan Jenis Prioritas Tahun Anggaran 2016-2021 (Jutaan Rupiah)	185
3.21	Proyeksi Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2013-2016	190
3.22	Target dan Realisasi APBD Kabupaten Kepulauan Sula	196
3.23	Rasio Likuiditas Kabupaten Kepulauan Sula	199
3.24	Rasio Solvabilitas Kabupaten Kepulauan Sula	201
4.1	Manajemen Keuangan Islam untuk Pemeliharaan Agama dan Perangkatnya	204
4.2	Manajemen Keuangan Daerah Kabupaten Kepulauan Sula Untuk Pemeliharaan Agama/ Keimanan	204
4.3	Manajemen Keuangan Islam untuk Pemeliharaan Jiwa dan Perangkatnya	210
4.4	Manajemen Keuangan Daerah Kabupaten Kepulauan Sula Untuk Pemeliharaan Jiwa	211
4.5	Manajemen Keuangan Islam untuk Pemeliharaan Akal dan Perangkatnya	219
4.6	Manajemen Keuangan Daerah Kabupaten Kepulauan Sula Untuk Pemeliharaan Akal	219
4.7	Manajemen Keuangan Islam untuk Pemeliharaan Keturunan dan Perangkatnya	230
4.8	Manajemen Keuangan Daerah Kabupaten Kepulauan Sula Untuk Pemeliharaan Keturunan	230
4.9	Manajemen Keuangan Islam untuk Pemeliharaan Harta dan Perangkatnya	237
4.10	Manajemen Keuangan Daerah Kabupaten Kepulauan Sula Untuk Pemeliharaan Harta	237

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1.1 Analisis Tiga Ranah Tesa, Antitesa dan Sintesa	40
3.1 Peta Kabupaten Kepulauan Sula	137



6) PP No. 8 tahun 2006 tentang laporan keuangan dan kinerja instansi pemerintah; 7) PP No. 3 tahun 2007 tentang laporan penyelenggaraan pemerintah daerah kepada pemerintah, laporan keterangan pertanggungjawaban kepada DPRD (LKPD), dan Informasi LPPD kepada masyarakat; 8) Permendagri No. 13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah; dan 9) Permendagri No. 59 tahun 2007 tentang perubahan atas permendagri No. 13 tahun 2006. Pada periode ini juga terjadi revisi paket Undang-Undang otonomi daerah yakni dari UU No. 22 tahun 1999 dan UU No. 25 tahun 1999 menjadi UU No. 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, dan UU No. 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Semakin komprehensifnya regulasi terkait pengelolaan keuangan daerah menandakan kesungguhan pemerintah mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang lebih transparan dan akuntabel.²²

Dari 9 (sembilan) landasan sistem keuangan tersebut di atas, peneliti hanya melihat pada 4 (empat) sistem yang dijadikan acuan landasan penelitian ini dalam pengaturan manajemen keuangan daerah, yaitu:

- 1) PP No. 58 tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah;
- 2) PP No. 3 tahun 2007 tentang laporan penyelenggaraan pemerintah daerah kepada pemerintah, laporan keterangan pertanggungjawaban kepada DPRD (LKPD), dan informasi LPPD kepada masyarakat;
- 3) Permendagri No. 13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah;
- 4) Permendagri No. 59 tahun 2007 tentang perubahan atas permendagri No. 13 tahun 2006, terjadi revisi paket Undang-Undang otonomi daerah yakni dari

²² Tim Asistensi Kementerian Keuangan Bidang Desentralisasi Fiskal, *Evaluasi Regulasi Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pengaruhnya Terhadap Upaya Peningkatan Kualitas Belanja Daerah*, 6-7.

Otonomi daerah adalah hak dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kemudian dijelaskan juga bahwa daerah otonom, selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.⁴³

Pada daerah otonomi, sistem pengawasan sangat menentukan kemandirian satuan otonomi. Untuk menghindari agar pengawasan tidak melemahkan otonomi, maka sistem pengawasan ditentukan secara spesifik baik lingkup maupun tata cara pelaksanaannya, karena hal-hal seperti memberlakukan prinsip “pengawasan umum” pada satuan otonomi dapat mempengaruhi dan membatasi kemandirian daerah. Makin banyak dan intensif pengawasan makin sempit kemandirian daerah. Makin sempit kemandirian makin terbatas otonomi.⁴⁴

Tetapi dalam hal ini, tidak boleh ada sistem otonomi yang sama sekali meniadakan pengawasan. UU No. 22 Tahun 1999 tentang keuangan pemerintahan daerah, sangat mengendorkan sistem pengawasan. Dapat dilihat pada penjelasan umum angka 10, disebutkan : “....sedangkan pengawasan lebih ditekankan pada pengawasan represif untuk memberi kebebasan kepada daerah otonomi dalam mengambil keputusan serta memberikan peran kepada DPRD dalam mewujudkan fungsi sebagai badan pengawas terhadap pelaksanaan otonomi daerah. Karena itu

⁴³ *Penjelasan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah* (Bandung: Citra Umbara, 2007), 4.

⁴⁴ Bagir, Manan., *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah* (Yogyakarta: Pusat Studi Hukum (PSH) Fak. Hukum UII, 2001), 39.

			terdapat perbedaan yang signifikan akan evaluasi pelaksanaan APBD antar kabupaten/kota di Sumatera Selatan. <i>Mann-Whitney Test</i> secara statistik tidak terdapat perbedaan evaluasi pelaksanaan APBD pada kabupaten dan kota, dan tidak terdapat perbedaan evaluasi pelaksanaan APBD pada kabupaten/kota pemekaran dengan kabupaten/kota non pemekaran.
3	Machmud, dkk.	2012	Memberikan keterangan yang lengkap atau gambaran yang sebenarnya mengenai kinerja keuangan daerah di Provinsi Sulawesi Utara. Kinerja keuangan daerah memberikan dampak baik terhadap perkembangan ekonomi.
4	Diana	2013	Keuangan Pemda elastis, menunjukkan secara rata-rata kelima propinsi memiliki nilai elastisitas pendapatan asli daerah yang inelastis. Perbedaan yang nyata atas evaluasi pelaksanaan Laporan Keuangan pada Propinsi se-Sumatera bagian Selatan.
5	Lindawati	2014	Keuangan daerah DKI Jakarta mampu memberikan dana netto yang disisihkan untuk membayar pokok dan bunga pinjaman sehubungan dengan pelaksanaan pembangunannya.
6	Sudirman Pauwah dkk,	2014	Sejak tahun 2009-2012 rasio kemandirian daerah Kabupaten Sula mengalami penurunan. Pemda lebih cermat lagi mengontrol semua badan dinas yang ada agar penyerapan dana lebih merata ke masing-masing badan dinas, karena realisasi PAD dari tahun ke tahun menurun. Pertumbuhan PAD kabupaten perlu diperbaiki dan ditingkatkan. Belanja pegawai memiliki nilai yang cukup besar jika

membuat sistematika pembahasan yang terdiri dari bab-bab yang saling berhubungan dan saling menunjang satu dengan yang lainnya secara logis, sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan terdiri dari latar belakang masalah sebagai telaah awal permasalahan untuk merumuskan masalah manajemen keuangan daerah, manajemen keuangan daerah di Indonesia, dan manajemen keuangan Islam serta gambaran umum Kabupaten Kepulauan Sula Maluku Utara yang menjadi sentral kajian yang nilai-nilai manajemen keuangan Islam terhadap keuangan daerah. Kemudian diwujudkan dengan identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian agar fokus pada masalah penelitian, kegunaan penelitian, kajian teori sebagai barometer dalam mengetahui pengelolaan manajemen keuangan daerah serta penelitian terdahulu sebagai pembanding dalam penelitian penulis serta metode penelitian yang digunakan dalam penelitian di Kabupaten Kepulauan Sula Maluku Utara.

BAB II, adalah kajian teori Manajemen Keuangan Islam yang meliputi; *Planning* (Perencanaan) Manajemen Keuangan, yang terdiri dari; *Planning* (Perencanaan) Manajemen Keuangan Islam, terdiri dari Manfaat Perencanaan Keuangan Islami, Perencanaan Keuangan Bagian Dari Maqasyid Syariah, Tahap Perencanaan Keuangan, Manajemen Nilai Anggaran Keuangan Islam, Nilai Tauhid (keesaan Tuhan), Nilai *Khilafah* (perwakilan), *'Adalah* (keadilan). *Planning* (Perencanaan) Manajemen Keuangan Daerah, yang terdiri dari; Manajemen Keuangan Daerah, Sistem Perencanaan Keuangan Daerah. *Organisation* Pembiayaan Manajemen Keuangan Islam yang terdiri dari; Sumber Pemasukan Baitul Maal, Pengorganisasian pengelolaan keuangan dalam Islam, Manajemen organisasi keuangan yang amanah, Manajemen Kejuruan harta dalam Islam. *Cordinating*

maslahat kemanusiaan, dalam kacamata Islam adalah sah, dan umat Islam terikat untuk mengambilnya dan merealisasikannya. Sebaliknya, tawaran teoritik apa pun dan yang bagaimana pun, yang secara meyakinkan tidak mendukung terjaminnya *maslahat*, membuka kemungkinan terjadinya kemudharatan, dalam kacamata Islam, adalah fasid, dan umat Islam secara orang perorang atau bersama-sama terikat untuk mencegahnya.

Untuk mempermudah pemahaman, dapat dikemukakan satu ilustrasi *syari'at zakah*. Tujuan disyari'atkan *zakah* adalah jelas: terwujudnya keadilan sosial dan kesejahteraan bersama dengan prinsip yang kuat membantu yang lemah. Di sini tidak ada keperluan sedikit pun untuk melakukan ijtihad guna menentukan hukumnya menegakkan keadilan sebagaimana dicita-citakan oleh konsep *zakah* tersebut. Yang perlu dilakukan ijtihad adalah dalam hal-hal berikut ini: *pertama*, mendefinisikan keadilan sosial dan pemerataan kesejahteraan dalam konteks ruang dan waktu tertentu, misalnya konteks bangsa Indonesia dalam dasawarsa kini dan mendatang; *kedua*, berapa beban yang harus ditanggung oleh mereka yang mampu (*miqdar al-zakah*), atas basis kekayaan apa saja (*mahall al-zakah*), kapan harus dibayar (*waqt al-'ada*), dan siapa-siapa serta dimana alamatnya yang secara riil dan definitif harus diuntungkan oleh *zakah*, dan sektor apa saja yang secara riil dan definitif harus didukung oleh dana *zakah* (*masraf al-zakah*), dan sebagainya; dan *ketiga*, kelembagaan apa saja yang seharusnya

mempergunakan dana tersebut untuk mendapatkan aset (aktiva). Seperti yang disebut diawal tadi, dengan melihat beberapa pengertian diatas, pengertian manajemen keuangan secara sederhana adalah suatu proses dalam aktivitas keuangan perusahaan, dimulai dari cara memperoleh dana dan mempergunakannya. Penggunaannya harus tepat sasaran, efisien, dan efektif supaya tujuan keuangan perusahaan yang sudah ditetapkan dalam perencanaan bisa terwujud.

Dalam manajemen keuangan memiliki tiga komponen atau kegiatan yang utama, adalah sebagai berikut, yaitu:

- a. Perolehan Dana, merupakan aktivitas yang bertujuan untuk memperoleh sumber dana, yang berasal dari internal perusahaan ataupun bersumber dari eksternal perusahaan.
- b. Penggunaan Dana, suatu aktivitas menggunakan atau menginvestasikan dana yang ada pada berbagai bentuk aset.
- c. Pengelolaan Aset (Aktiva), aktivitas ini adalah kegiatan yang dilakukan setelah dana telah didapat dan telah diinvestasikan atau dialokasikan kedalam bentuk aset (atkiva), dana harus dikelola secara efektif dan efisien.

Dengan aktivitas-aktivitas diatas tersebut, dengan kata lain fungsi pengambilan keputusan manajemen keuangan adalah keputusan mengenai pendanaan, investasi dan manajemen asset.

Manajemen keuangan tidak hanya sekedar pencatatan akuntansi saja. manajemen keuangan adalah bagian yang penting dan tidak bisa dianggap sebagai suatu kegiatan tersendiri yang menjadi bagian dari

aktivitas kepada yang berkepentingan, termasuk memberikan laporan keuangan yang wajar, lengkap, tepat waktu dan akurat yang bisa diakses dengan mudah oleh yang berkepentingan, apabila tidak transparan, maka ini bisa mengindikasikan manajemen telah menyembunyikan sesuatu.

4. *Viability* (Kelangsungan Hidup). Supaya kesehatan keuangan perusahaan terjaga, semua pengeluaran operasional ataupun ditingkat yang strategis harus disesuaikan dengan dana yang ada. Kelangsungan hidup entitas merupakan ukuran suatu tingkat keamanan serta keberlanjutan keuangan perusahaan. Manajemen keuangan harus menyusun rencana keuangan dimana menunjukkan bagaimana suatu perusahaan bisa menjalankan rencana strategisnya guna memenuhi kebutuhan keuangan.
5. *Integrity* (Integritas). Setiap individu harus memiliki tingkat integritas yang mumpuni dalam menjalankan kegiatan operasional. Selain itu catatan dan laporan keuangan harus terjaga integritasnya dengan kelengkapan dan tingkat keakuratan suatu pencatatan keuangan.
6. *Stewardship* (Pengelolaan). Manajemen keuangan harus bisa mengelola dengan mumpuni dana yang sudah didapat dan memberikan jaminan bahwa dana yang diperoleh tersebut akan digunakan untuk merealisasikan tujuan yang sudah ditetapkan. Dalam prakteknya, manajemen bisa melakukan bisa berhati-hati dalam membuat perencanaan strategis, mengidentifikasi risiko keuangan yang ada

- a. Bahwa kebijakan pembiayaan rutin harus sesuai dengan asas maslahat umum, tidak boleh dikaitkan dengan kemaslahatan seseorang atau kelompok masyarakat tertentu, apalagi kemaslahatan pemerintah.
- b. Kaidah atau prinsip efisiensi dalam pembiayaan rutin, yaitu mendapatkan sebanyak mungkin manfaat dalam biaya semurah-murahnya, dengan sendirinya jauh dari sifat mubadzir dan kikir di samping alokasinya pada sektor-sektor yang tidak bertentangan dengan syariah.
- c. Kaidah selanjutnya adalah tidak berpihak pada kelompok kaya dalam pembiayaannya, walaupun dibolehkan berpihak pada kelompok miskin. Kaidah tersebut cukup berlandaskan pada nas-nas yang sahih seperti pada kasus "*al-hima*" yaitu tanah yang diblokir oleh pemerintah yang khusus diperuntukkan bagi kepentingan umum. Ketika Rasulullah menghususkan tanah untuk pengembalaan ternak kaum duafa, Rasulullah melarang ternak-ternak milik para agniya atau orang kaya yang mengembala di sana. Bahkan Umar berkata: "Hati-hati jangan sampai ternak Abdurrahman bin Auf mendekati lahan pengembalaan kaum duafa."
- d. Kaidah atau prinsip komitmen dengan aturan syariah, maka alokasi pembiayaan negara hanya boleh pada hal-hal yang mubah dan menjauhi yang haram.
- e. Kaidah atau prinsip komitmen dengan skala prioritas syariah, di mulai dari yang wajib, sunah, dan mubah.

- c. *Hifdzu al-'Aql* (pemeliharaan akal)
- d. *Hifdzu an-Nasl* (Pemeliharaan keturunan)
- e. *Hifdzu al-Maal* (pemeliharaan harta)

Urutan di atas tidak boleh diputar balik karena sudah merupakan skala prioritas kebutuhan dasar pembiayaan pemenuhan dalam Islam. Tidak boleh meletakkan kebutuhan pemeliharaan jiwa di atas pemeliharaan agama, atau kebutuhan pemeliharaan harta di atas pemeliharaan jiwa. Penyusunan urutan tersebut sudah memenuhi skala prioritas dalam pemenuhan kebutuhan dasar pembiayaan (*ad-Dharuriyyat*) dalam Islam.

Untuk menyusun keuangan APBD Kabupaten Kepulauan Sula pada anggaran pembiayaan keuangan yang berdasarkan pada prinsip Al-Quran dan As-Sunnah, yang bertujuan mensejahterakan rakyat dalam konsep pemenuhan kebutuhan dasar (*Five Basic Needs*) adalah salah satu konsep yang tepat di dalam menyusun anggaran baik dalam kehidupan bernegara, daerah maupun keluarga. Karena secara umum, prinsip nilai ini dapat diterapkan diberbagai sektor kehidupan.

Seperti telah dijelaskan di atas bahwa dalam penyusunan anggaran pembiayaan yang berdasarkan *maqashid syariah/dharuriyyat al-khams* harus berurutan sesuai dengan skala prioritas yaitu; pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan dan harta, dan tidak boleh mendahulukan urutan pertama ke urutan kedua atau sebaliknya. Contohnya meletakkan kebutuhan agama setelah kebutuhan jiwa.

Namun demikian, peneliti berpendapat bahwa jika kebutuhan pemeliharaan agama atau yang lainnya sudah terpenuhi semuanya, maka porsi

untuk pemenuhan kebutuhan agama dapat diperkecil dan dialihkan ke pemenuhan kebutuhan yang lainnya sesuai dengan prioritas, misalnya jika sarana ibadah sudah mencukupi, pelaksanaan rukun Islam sudah dapat dilaksanakan dengan baik dan keadilan sudah dapat ditegakan kualitas keimanan sudah cukup baik, maka dibolehkan dana tersebut dialihkan ke pemenuhan kebutuhan yang lain, misalnya jika taraf pendidikan penduduk setempat sangat rendah namun kegiatan keagamaan dan fasilitas serta kualitas keagamaan cukup baik, maka sebahagian dana tersebut dapat dialihkan untuk meningkatkan taraf pendidikan atau perekonomian penduduk setempat.

Berdasarkan klasifikasi dalam Islam *ad-dharuriyaatul khams* di atas, maka peneliti mengkalsifikasikan manajemen keuangan daerah Kabupaten Kepulauan Sula pada unit dan bidang organisasi di anggaran pembiayaan daerah di atas sebagai berikut:

- a. Yang termasuk ke dalam pemeliharaan agama (*hifdzu ad-dien*) yaitu; pemenuhan pelaksanaan rukun Islam (idiologi, shalat, puasa, zakat dan haji), penegakan keadilan dan jihad maka dalam anggaran pembiayaan daerah Kabupaten Kepulauan Sula, peneliti belum menemukan anggaran pembiayaan khusus untuk pemenuhan kebutuhan pemeliharaan agama kecuali untuk lembaga pengawas daerah dan peradilan.
- b. Adapun anggaran pembiayaan yang dialokasikan untuk pemenuhan pemeliharaan jiwa (*hifdzu nafs*) yang meliputi; pemenuhan sandang, pangan, papan, kesehatan, fasilitas jalan, transportasi, keamanan, lapangan kerja dan pelayanan sosial dalam anggaran belanja daerah Kabupaten Kepulauan Sula tahun 2016 adalah; bidang pertanian, bidang kesehatan,

bidang perikanan dan peternakan, bidang kehutanan dan perkebunan, bidang ketenagakerjaan, bidang perhubungan dan dinas polisi pamong praja dan perlindungan masyarakat dan kantor kecamatan.

- c. Sedangkan anggaran pembiayaan yang dialokasikan untuk pemenuhan kebutuhan akal (*hifdzu aql*) yang meliputi; pendidikan, media dan pengetahuan serta riset, dalam anggaran belanja daerah Kabupaten Kepulauan Sula adalah: bidang pendidikan dan kebudayaan dan kantor arsip daerah.
- d. Sedangkan anggaran pembiayaan untuk pemenuhan kebutuhan pemeliharaan keturunan (*hifdzu an-nasl*) yang meliputi; lembaga perkawinan, pelayanan bagi ibu yang hamil dan menyusui, pelayanan bagi anak dan memelihara anak yatim, baru termuat dalam APBD tahun 2016 pada bidang kependudukan, belum ada anggaran khusus dari anggaran belanja daerah Kabupaten Kepulauan Sula untuk alokasi dana tersebut, sedangkan dari APBN dari departemen kesehatan dan kesra sudah dianggarkan, namun tentunya akan lebih baik jika APBD Kabupaten Kepulauan Sula juga menganggarkan pembiayaan untuk pemenuhan kebutuhan di atas seperti jaminan sosial dan pendidikan atas anak yatim dan anak kurang mampu (putus sekolah), pemeliharaan kesehatan untuk ibu hamil dan menyusui serta lembaga perkawinan.
- e. Adapun untuk pemenuhan kebutuhan pembiayaan pemeliharaan harta (*hifdzu al-maal*) yang meliputi; keuangan, regulasi transaksi bisnis, penyadaran tentang urgensi usaha halal, penegakan hukum dan pengawasan dalam kegiatan usaha, serta peningkatan kegiatan

<p>1. Badan Pengawas Daerah</p> <p>2. Lembaga Peradilan</p> <p><u>Catatan :</u></p> <p>Belum ada alokasi Khusus untuk pemenuhan Kebutuhan Pemeliharaan Agama</p>	<p>Yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bidang Pertanian 2. Bidang Perikanan dan Peternakan 3. Bidang Kehutanan dan Perkebunan 4. Bidang Ketenagakerjaan 5. Bidang Kesehatan 6. Bidang Perhubungan 7. Dinas Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat. 8. Badan Perencana Daerah 9. Kecamatan <p><u>Catatan:</u></p> <p>Belum ada alokasi dana Khusus untuk Jaminan sosial bagi fakir, miskin, jompo, pengangguran dsb.</p>	<p>Yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bidang Pendidikan dan Kebudayaan 2. Kantor Arsip Daerah <p><u>Catatan:</u></p> <p>Belum ada anggaran untuk kegiatan Riset, Media dan Pengetahuan dalam APBD 2016</p>	<p>Yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bidang Kependudukan <p><u>Catatan:</u></p> <p>Belum ada jaminan sosial anak yaitm, anak putus sekolah, kesehatan anak, ibu hamil dan menyusui dari APBD 2016</p>	<p>Yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah 2. Bidang Pertambangan dan Energi 3. Bidang Perindustrian dan Perdagangan 4. Bidang Pekerjaan Umum
--	--	--	---	---

Tabel 2.3

mengalami peningkatan dibandingkan pada priode-priode yang telah lalu. Keberhasilan pelaksanaan pembangunan priode masa lalu tergambar melalui kajian dan analisis umum terkait data dan informasi sebagai gambaran umum fenomena pembangunan secara mikro maupun makro. Pembahasan gambaran umum kondisi Kabupaten Keulauan Sula dijabarkan sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008, yang terdiri dari Aspek Geografi dan Demografi, Asek Kesejahteraan Rakyat serta Aspek Pelayanan Umum dan Aspek Daya Saing Daerah dengan uraian sebagai berikut :

1. Aspek Geografi dan Demografi

- a. Luas dan Batas Wilayah Administrasi

Wilayah Kabupaten Kepulauan Sula terdiri dari 2 (dua) pulau besar, yaitu Pulau Mangoli dan Pulau Sulabesi yang menjadi pusat permukiman sebagian besar penduduk. Berdasarkan kelas ketinggian wilayah Kabupaten Keulauan Sula berada pada ketinggian 0 – 100 meter di atas permukaan laut. Kondisi dan ekosistem hutan relatif masih utuh dengan tipe hutan hujan dataran rendah dan hutan hujan pegunungan.

Wilayah administrasi Kabupaten kepulauan Sula terdiri dari 12 kecamatan dan 74 Desa, serta dikelilingi oleh pulau-pulau kecil. Sejalan dengan reformasi dibidang pemerintahan dan otonomi daerah, serta

Dari data yang terdapat dalam tabel tersebut di atas, dapat diketahui bahwa; jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada tahun 2016 sebanyak 25 orang, yang terdiri 24 orang laki-laki dan 1 orang perempuan dan dari segi agama 23 orang beragama Islam dan 2 orang beragama Kristen Protestan yang di usung oleh partai PDIP 1 orang dan partai Garindra 1 orang.

Tabel 3.7

Nama-nama Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Menurut Partai Politik dan Jenis Kelamin di Kabupaten Kepulauan Sula, 2016

No	Partai Politik	Laki-laki	Perempuan	Agama	Jumlah
1	Golkar	1. Ir. H. Ismail Kharie	0	Islam	6
		2. Ahkam Gazali, S.Ag		Islam	
		3. Iksan Umaternate, S.Ag		Islam	
		4. Mahyudin Fokatea, SP		Islam	
		5. Bahrain Buton		Islam	
		6. Aman Umanahu		Islam	
2	PDI-Perjuangan	1. Jufri Umasugi, S.Sos	0	Islam	2
		2. Ricardo Hongarta		Kristen	
3	PAN	1. Abd. Kadir Sapsuha	0	Islam	2
		2. Halik Teapon, S.Ip		Islam	
4	Demkrat	1. Julfi Umasangadji, SE	0	Islam	2
		2. Helman Umanahu		Islam	
5	PPP	1. Bah Udin Suamole	0	Islam	2
		2. Jauhar Buamona		Islam	
6	Garinra	1. Alexander Yosinade	0	Kriten	2
		2. La Usman La Hamja		Islam	
7	Hanura	1. Mulki Pora, SH	1. Hidayat T. Suamole, ST	Islam	2
8	PKS	1. Ilyas Jainahu	0	Islam	2

penerimaan APBD berasal dari dana perimbangan sebesar Rp. 785.927.019.140,- atau sebesar 92,2 persen dari total penerimaan APBD.²⁷²

Dalam realisasi pembiayaan pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula tahun 2016 mencapai Rp. 882.734.401.691,13,- pembiayaan lebih besar dibandingkan pendapatan yang diterima oleh pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula. Jika dibandingkan dengan data tahun lalu, tahun 2016 mengalami peningkatan pembiayaan sebesar 30,6 persen. Bagian terbesar dari realisasi pembiayaan pemerintah berasal dari pembiayaan langsung, yaitu sebesar Rp. 578.261.473.723,98,- atau sebesar 65,51 persen dari total realisasi pembiayaan APBD.²⁷³

Untuk itu Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kepulauan Sula tahun 2016 sebesar Rp. 28.023.166.704,-, dan pendapatan lain yang sah Rp. 56.028.337.147,- Sedangkan dana perimbangan tahun 2016 sebesar Rp. 785.927.019.140,- Jadi keseluruhan Anggaran APBD Kabupaten Kepulauan Sula sebesar Rp. 869.978.522.991,-

Dalam realisasi pembiayaan anggaran daerah perubahan tahun 2016 Kabupaten Kepulauan Sula sebesar Rp. 882.734.401.691,13,- bila dibandingkan APBD murni tahun 2016 Rp. 869.978.522.991,- maka terjadi Devisit Anggaran pembiayaan daerah Kabupaten Kepulauan Sula sebesar Rp. 12.755.878.700.13,-.

Bila dilihat dari anggaran pembiayaan pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Sula dalam anggaran perubahan tahun 2016, dalam hal pembiayaan langsung sebesar Rp. 578.261.473.723,98,- dari keseluruhan anggaran pembiayaan

²⁷² Sumber Data; Badan Pusat Statistik Kepulauan Sula, Statistik Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sula 2016, 34.

²⁷³ Sumber Data: Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sula Maluku Utara NO. 02 Tahun 2016, Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Sula tahun Anggaran 2016, 5.

pemerintah daerah tahun 2016 sebesar Rp. 882.734.401.691,13,- Sedangkan pembiayaan tidak langsung dari keseluruhan pembiayaan daerah diketahui sebesar Rp. 304.472.927.967,15,-.

Pada prinsip sistem keuangan daerah, seperti yang tercantum dalam pasal 67 UU No. 33/2004, yaitu: “Dalam hal APBD diperkirakan defisit, ditetapkan sumber-sumber pembiayaan untuk menutup defisit tersebut dalam Peraturan Daerah tentang APBD”. Pada prinsip sistem manajemen keuangan daerah, menurut teori Sonny Yuwono, dkk,²⁷⁴ yaitu: “Efektif merupakan pencapaian hasil program dengan target yang telah ditetapkan, yaitu dengan cara membandingkan keluaran dengan hasil”.

Pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Sula dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang, kewajiban yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula pada tahun 2016 adalah sebesar Rp. 12.755.878.700.13,-. Kewajiban Jangka Pendek, yang diharapkan harus diselesaikan dalam jangka waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan, turun rata-rata 22,10 % per tahun. Penurunan utang jangka pendek ini didorong adanya penurunan utang jangka linnya. Sejak tahun 2014 Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula tidak mempunyai kewajiban jangka panjang.

Bdasarkan data dan teori tersebut, peneliti berpandangan bahwa, jika memang pertumbuhan ekonomi terus berlangsung, hal ini semestinya butuh pertimbangan perencanaan yang matang, agar tidak terjadi defisit, karena Kabupaten Kepulauan Sula dimanjakan dengan pembiayaan belanja hutang. Dari analisis terhadap data-data maka dapat dikatakan bahwa indikasi pembiayaan belanja devisit dapat menambah pengangguran dan kemiskinan yang terus melebar, sekalipun ekonomi di Kabupaten

²⁷⁴ Sonny Yuwono, dkk., *Memahami APBD dan Permasalahannya* (Panduan Pengelolaan Keuangan Daerah). (Malang: Bayumedia Publishing, 2008), 43.

Tabel 3.9

Anggaran Pembiayaan Daerah Kabupaten Kepulauan Sula, 2016

No	Jenis Penerimaan (1)	Ralisasi (2)
	Belanja Tidak Langsung	304.472.927.967,15
	1. Belanja Pegawai	226.326.429.119,15
	2. Belanja Bunga	-
	3. Belanja Subsidi	-
I	4. Belanja Hibah	2.100.000.000
	5. Belanja Bantuan Sosial	343.093.200
	6. Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota	-
	7. Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/ Kota dan Pemerintah Desa	74.703.405.648
	8. Belanja Tidak Terduga	1.000.000.000
	Belanja Langsung	578.261.473.723,98
II	1. Belanja Pegawai	45.043.169.500
	2. Belanja Barang dan Jasa	215.108.627.701,98
	3. Belanja Modal	318.109.676.522
	Jumlah	882.734.401.691,13

Sumber Data; APBD Kabupaten Kepulauan Sula Tahun, 2016

pemeliharaan mencapai 0,2 persen (Rp. 2.100.000.000,-), di samping itu ada juga pembiayaan tidak terduga sebesar 0,1 persen (Rp. 1.000.000.000,-), biaya lain-lain mencapai 0.03 persen (Rp. 343.093.200,-).

Prinsip yang dianut dalam pengelolaan keuangan daerah, seperti yang tercantum dalam pasal 67 UU No. 33/2004 adalah sebagai berikut: “Semua pengeluaran daerah, termasuk subsidi, hibah, dan bantuan keuangan lainnya yang sesuai dengan program pemerintah daerah didanai melalui APBD”.

Dalam pasal 67 UU No. 33/2004, untuk meningkatkan pendapatan penduduk setempat, pemerintah daerah dapat memberikan bantuan modal pinjaman bergulir. Pinjaman dana tersebut dapat digunakan untuk keperluan investasi dalam bentuk *musyarakah*²⁸¹ maupun *mudharabah*,²⁸² oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sula, pembiayaan tersebut sebagai pemasukan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada tahun yang akan datang, dan dari hasil investasi tersebut dapat menambah pendapatan untuk kesejahteraan penduduk.

Untuk meningkatkan pendapatan penduduk setempat, pemerintah daerah memberikan bantuan modal pinjaman bergulir berupa *musyarakah* atau *mudharabah*, yang diambil dari pembiayaan modal, misalnya untuk penggemukan sapi dan peternakan kambing, atau *muzara'ah* dan *ba'i as-salam*²⁸³ dalam pertanian, sehingga penduduk setempat mendapat dana segar dari Pemerintah Daerah untuk menambah

²⁸¹ yaitu akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana (atau amal/expertise) dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan kerugian ditanggung bersama.

²⁸² yaitu akad kerjasama antara dua pihak dimana pihak pertama (sahibul maal) menyediakan (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha dibagi menurut kesepakatan kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama bukan disebabkan oleh kelalaian pengelola, tetapi jika karena kelalaian pengelola, maka kerugian ditanggung pengelola.

²⁸³ Yaitu pembelian barang yang diserahkan dikemudian hari sementara pembayaran dilakukan dimuka, bisa dilakukan untuk pembiayaan pertanian jangka pendek, seperti penanaman cabai, padi, dan sebagainya. Di sini Pemda atau Koperasi bertindak sebagai pembeli dan petani sebagai penjual dengan harga yang sudah disepakati sebelumnya.

Berdasarkan Undang-undang, teori dan penjelasan para informen, peneliti berpandangan bahwa; untuk memaknai atau menginterpretasikan secara benar berbagai indikator pembiayaan ekonomi makro yang digunakan sebagai asumsi dasar dalam pengelolaan APBD Kabupaten Kepulauan Sula, perlu pemahaman nilai-nilai moral yang baik dan komprehensif mengenai banyak variable ekonomi makro dan masalah krisis ekonomi Indonesia umumnya dan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula khususnya, sangat dimungkinkan terjadinya indikasi atau salah interpretasi dalam menangkap fakta dan fenomena untuk kesejahteraan masyarakat.

Untuk itu dalam kebijakan manajemen keuangan pembiayaan Islam pendekatan yang digunakan adalah pemenuhan kebutuhan dasar (*basic needs*) individu, melalui pemerataan distribusi pembiayaan kekayaan. Manajemen keuangan Islam langsung mengarahkan kebijakan fiskalnya kepada warga masyarakat yang ditimpa kemiskinan. Arah ini berbeda 180 derajat dengan kebijakan fiskal konvensional yang untuk memecahkan kemiskinan harus menggemukkan golongan kaya dulu baru kemudian kekayaan yang dipupuk secara nasional dialirkan dari golongan kaya tersebut ke golongan miskin (*trickle down effect*) melalui mekanisme pasar. Padahal tidak semua rakyat memiliki akses untuk terlibat dalam proses produksi dalam mekanisme pasar.

Sebagaimana disebutkan sebelumnya, manajemen keuangan dalam ekonomi yang mendasari kebijakan fiskal Islam adalah menjamin pemenuhan kebutuhan pokok setiap individu secara menyeluruh dan mendorong mereka memenuhi berbagai kebutuhan sekunder dan tersiernya sesuai dengan kadar kemampuannya.

Menurut al-Maliki kebutuhan pokok yang disyariatkan oleh Islam terbagi dua. *Pertama*, kebutuhan-kebutuhan primer bagi setiap individu secara menyeluruh,

berpartisipasi dalam perkembangan serta dinamika pembangunan daerah terutama yang secara langsung mempengaruhi kehidupan mereka.

Perjalanan penyelenggaraan pemerintahan dan otonomi daerah di Indonesia sebenarnya telah dimulai semenjak tahun 1974 yang ditandai dengan diberlakukannya Undang-Undang No 5 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah. Tetapi, Undang-undang ini tidak terlaksana sebagaimana yang diharapkan.

Perubahan iklim politik yang ditandai dengan terjadinya reformasi penyelenggaraan pemerintahan pada tahun 1998 maka tuntutan terhadap otonomi daerah yang lebih luas dapat terwujud yang ditandai dengan diberlakukannya Undang-Undang No 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang No 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Transisi kebijakan otonomi daerah selanjutnya ditandai dengan perubahan payung hukum penyelenggaraan otonomi daerah dari UU No 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang Undang No 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.

Struktur APBD yang diamanatkan Kepemendagri Nomor 29 tahun 2002, Permendagri Nomor 13 tahun 2006 dan Permendagri Nomor 59 tahun 2007 menganut azas surplus/defisit anggaran, dimana dimungkinkan adanya pos pembiayaan untuk mengakomodasi kondisi anggaran surplus ataupun defisit. Dengan demikian, struktur APBD pasca reformasi terdiri dari Pendapatan dan pembiayaan. Pendapatan Terdiri dari; Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak serta Pendapatan Lain-Lain.

Perbedaan struktur anggaran antara yang diamanatkan oleh Kepemendagri Nomor 29 tahun 2002 dengan yang diamanatkan oleh Permendagri Nomor 13 tahun

2006 dan Permendagri Nomor 59 tahun 2007 adalah pada struktur pembiayaan sedangkan struktur pendapatan dan pembiayaannya sama. Pada APBD versi Kepmendagri Nomor 29 tahun 2002, pembiayaan terdiri dari pembiayaan aparatur publik dan publik yang dibagi kedalam jenis pembiayaan administrasi umum, pembiayaan operasi dan pemeliharaan serta pembiayaan modal. Sedangkan pada APBD versi Permendagri Nomor 13 tahun 2006 dan Permendagri Nomor 59 tahun 2007, pembiayaan hanya dikategorikan kedalam pembiayaan langsung dan pembiayaan tidak langsung. Pembiayaan Langsung adalah pembiayaan yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan dan pembangunan, sedangkan pembiayaan tidak langsung terkait dengan pembiayaan pegawai berupa gaji dan tunjangan yang tidak terkait dengan penyelenggaraan pelayanan dan pembangunan.

Fungsi pengelolaan manajemen keuangan daerah saat ini dilaksanakan oleh organisasi dalam tingkatan dan bentuk yang berbeda-beda pada masing-masing daerah. Dengan diterbitkannya UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang ditindaklanjuti dengan PP Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, maka perlu dilakukan penataan kembali terhadap keberadaan unit organisasi yang menangani pengelolaan keuangan daerah.

Manajemen keuangan daerah tidak dapat dilepaskan dari keberadaan Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Undang-undang Nomor 15

tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Dengan terbitnya Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 dan Undang-undang nomor 33 tahun 2004 maka berbagai prinsip dasar yang ada dalam Undang-undang Keuangan Negara, Undang-undang Perbendaharaan dan Undang-undang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara kembali dipertegas dan menjadi acuan dalam pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah meliputi 3 (tiga) tahapan yaitu; perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban.²⁹⁴

Dalam 3 (tiga) tahapan pengelolaan keuangan daerah yang perlu diperhatikan adalah mengenai tupoksi dan posisi Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) atau Badan Pengelola Keuangan dan Kekayaan Daerah (BPKKD) dan Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai instansi pengguna anggaran dan pelaksana program. Pembagian peran stakeholder yang terlibat dalam pengelolaan keuangan daerah telah diatur dengan jelas di dalam Permendagri Nomor 13 tahun 2006 yang merupakan ketentuan lanjutan dari Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 58 tahun 2005.

Badan Pengelola Keuangan dan Kekayaan Daerah (BPKKD) adalah unsur penunjang pemerintahan daerah dalam pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah. BPKKD mempunyai tugas melaksanakan sebagian kewenangan pemerintah daerah di bidang pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah.

BPKKD dipimpin oleh seorang kepala Badan yang selanjutnya disebut Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah (BUD).

²⁹⁴ Kajian Akademis Organisasi Pengelola Keuangan Daerah, *Reformasi Organisasi Pengelolaan Keuangan Daerah*, Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum Departemen Dalam Negeri, 2009, 42.

4. Kerangka hukum dan administrasi bagi pembiayaan, investasi dan pengelolaan keuangan daerah didasarkan pada kaidah mekanisme pengelolaan uang daerah berdasarkan kaidah mekanisme pada *value for money*, transparansi dan akuntabilitas;
5. Kejelasan kedudukan DPRD, Bupati, pegawai;
6. Ketentuan tentang bentuk dan struktur anggaran, anggaran kinerja dan anggaran multi tahunan;
7. Prinsip pengadaan dan pengelolaan barang daerah yang professional;
8. Prinsip akuntansi pemerintah daerah laporan keuangan, peran DPRD, akuntan publik dalam pengawasan, pemberian opini dan rating kinerja anggaran dan transparansi informasi ke publik.

Ditinjau dari aspek administrasi atau manajemen yang dimaksud dengan pengelolaan keuangan adalah proses pengurusan, penyelenggaraan, penyediaan dan penggunaan uang dalam setiap usaha kerja sama sekelompok orang untuk tercapainya suatu tujuan. Proses ini tersusun dari pelaksanaan fungsi-fungsi penganggaran, pembukuan, dan pemeriksaan atau secara operasional apabila dirangkaikan dengan daerah maka pengelolaan keuangan daerah meliputi penyusunan, penetapan, pelaksanaan, pengawasan dan perhitungan anggaran pendapatan dan pembiayaan daerah.

D. Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kepulauan Sula

Kebijakan pengelolaan keuangan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula selama 2014 – 2016, dilihat dari proporsi terhadap pembiayaan daerah menunjukkan kecenderungan yang menurun. Pada tahun 2014 proporsi pembiayaan aparatur

diharapkan semakin meningkat. Hal ini didasarkan pada asumsi bahwa laju pertumbuhan pendapatan daerah diproyeksikan mengalami peningkatan dan terjadi peningkatan efektifitas penggunaan pembiayaan daerah.

Berdasarkan data pada tahun 2015 daya serap anggaran, pada pembiayaan langsung rata-rata hanya mampu menyerap 82,39% anggaran, dengan perincian sebagai berikut :

- a) Jenis pembiayaan pegawai, daya serap sebesar 89,71 %
- b) Jenis pembiayaan barang dan jasa, sebesar 94,50 %
- c) Jenis pembiayaan modal sebesar 71,46 %.

Berdasarkan data tersebut di atas SiLPA sangat mungkin terjadi pada tahun-tahun anggaran di masa mendatang. Angka SiLPA tersebut harus ditekan mengingat besarnya SiLPA tersebut di akibatkan oleh rendahnya serapan pembiayaan daerah. Oleh karena itu, disusun skenario bahwa SiLPA dapat ditekan menjadi sebesar 5% pada setiap tahunnya. Tetapi apabila SiLPA pada akhir tahun terealisasi di atas 5%, selisih tersebut diprioritaskan pada dana cadangan, penyertaan modal, penambahan program dan kegiatan prioritas yang dibutuhkan, penambahan volume program dan kegiatan yang telah dianggarkan, serta pembiayaan peningkatan jaminan sosial.

Prioritas I, dialokasikan untuk mendanai pembiayaan dan pembiayaan wajib dan mengikat serta prioritas utama.

Prioritas II, dialokasikan untuk pendanaan :

- a) Program unggulan dalam rangka pencapaian visi dan misi kepala daerah (Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Sula) periode 2016-2021, yang seiring dengan amanat RPJMN dan RPJMD Provinsi Maluku Utara yang definitif harus dilaksanakan oleh daerah pada tahun rencana. Program tersebut harus berhubungan langsung dengan kepentingan publik, bersifat monumental, berskala besar, dan memiliki kepentingan dan nilai manfaat yang tinggi, memberikan dampak luas pada masyarakat dengan daya ungkit yang tinggi pada capaian visi/misi daerah.
- b) Program prioritas dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang paling berdampak luas pada masing-masing segmentasi masyarakat yang dilayani sesuai dengan prioritas dan permasalahan yang dihadapi berhubungan dengan layanan dasar dan tugas dan fungsi OPD.

Prioritas III, merupakan prioritas yang dimaksudkan untuk alokasi pembiayaan tidak langsung seperti: pembiayaan hibah, pembiayaan bantuan sosial organisasi kemasyarakatan, pembiayaan bantuan keuangan dan pemerintahan desa serta pembiayaan tidak terduga. Pengalokasiannya Prioritas III harus memperhatikan (mendahulukan) pemenuhan dana pada prioritas I dan II terlebih dahulu untuk menunjukkan urutan prioritas yang benar. Berkaitan

Dengan diberlakukannya anggaran kerja, dalam penyusunan APBD dimungkinkan adanya defisit maupun surplus. Defisit terjadi ketika pendapatan lebih kecil dibandingkan dengan pembiayaan, sedangkan surplus terjadi ketika pendapatan lebih besar dibandingkan beban. Untuk menutup defisit dan surplus diperlukan pembiayaan daerah.

Pembiayaan adalah transaksi keuangan daerah yang dimaksudkan untuk menutup selisih antara pendapatan daerah dan pembiayaan daerah bila terjadi defisit anggaran. Sumber pembiayaan dapat berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu, penerimaan pinjaman obligasi, transfer dari dana cadangan, maupun hasil penjualan aset daerah yang dipisahkan. Sedangkan dalam pembiayaan itu sendiri adalah angsuran hutang, bantuan modal dan transfer ke dana cadangan.

Dari prediksi 5 (lima) tahun kedepan, terlihat bahwa terdapat kecenderungan SiLPA yang mengalami peningkatan. Oleh karena itu, untuk memaksimalkan anggaran daerah untuk program-program pembangunan, daerah juga perlu melakukan langkah-langkah pembiayaan yang dapat memanfaatkan SiLPA tersebut. Terlebih karena Kabupaten Kepulauan Sula tidak memiliki kewajiban jangka panjang sehingga perlu mengalokasikan pembiayaan pada pos lain yang dapat memberikan manfaat bagi daerah seperti penyertaan modal daerah baik kepada Bank Pembangunan Daerah Maluku, Maluku Utara maupun Badan Usaha Milik Daerah.

Proyeksi Pembiayaan Daerah Tahun 2016-2021 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.20

Alokasi Kapasitas Keuangan Daerah Berdasarkan Jenis Prioritas Tahun Anggaran 2016-2021 (Jutaan Rupiah)

Uraian	Tahun					
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
SURPLUS (DEFISIT)	-12.755,88	-42.498,93	-50.728,38	-55.332,14	-62.747,57	-71.074,43
PEMBIAYAAN						
PENERIMAAN DAERAH						
Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran SiLPA	98.801,00	43.498,93	53.728,38	60.332,14	67.747,57	76.074,43
Penerimaan Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah Penerimaan	98.801,00	43.498,93	53.728,38	60.332,14	67.747,57	76.074,43
PEMBIAYAAN DAERAH						
Penyertaan Modal (Invetasi) Pemerintah Daerah	0,00	1.000,00	3.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Pembayaran Pokok Utang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pembentukan Piutang-Tuntunan Ganti Rugi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah Pembiayaan	0,00	1.000,00	3.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
PEMBIAYAAN NETO	98.801,00	42.498,93	50.728,38	55.332,14	62.747,57	71.074,43

Sumber Data: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2016-2021

E. Manajemen Kontrol Keuangan Daerah Kabupaten Kepulauan Sula

Pada hakikatnya Otonomi Daerah diberikan kepada rakyat sebagai satu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat, terutama daerah dapat meningkatkan kapasitas fiskal (*fiscal capacity*) agar mampu mencukupi kebutuhan fiskalnya (*fiscal need*) agar tidak mengalami defisit fiskal (*fiscal gap*). Salah satu upaya untuk meningkatkan kapasitas fiskal daerah tersebut adalah dengan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Terkait dengan hal tersebut, manajemen keuangan daerah merupakan keseluruhan pengelolaan keuangan yang kegiatannya meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah adalah hal yang sangat penting dalam proses perencanaan satu daerah secara keseluruhan. Tahapan-tahapan dalam pengelolaan keuangan daerah sangat krusial dalam memulai roda pemerintahan dan pembangunan setiap tahunnya. Oleh karena itu, perwujudan pelayanan dan kesejahteraan kepada masyarakat dari pengelolaan manajemen keuangan daerah harus memiliki perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan yang terstruktur dengan baik.

1. Kinerja Keuangan Masa Lalu

Pengelolaan manajemen keuangan daerah yang dimulai dari perencanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pengawasan, telah mengalami perubahan yang sangat besar. Perubahan ini terkait dengan paket Undang-undang keuangan negara dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 Tentang Keunagan Negara. Undang-undang Nomor 1 tahun 2004 Tentang Perbendaharaan. Undang-undang Nomor 15 tahun 2004 tentang

Tabel 3.21

Proyeksi Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2013-2016

Jenis Pendapatan	2013		2014		2015		2016		Pertumbuhan
	Nilai (Rp)	Proporsi	Nilai (Rp)	Proporsi	Nilai (Rp)	Proporsi	Nilai (Rp)	Proporsi	
Pendapatan Daerah	582.662.368		558.083.361		711.983.159		821.833.249		5,14 %
Pendapatan Asli Daerah (PAD)	40.000.000	6,87 %	19.029.523	3,41 %	13.622.269	2,43 %	28.023.166	1,91 %	-23,61 %
Pajak Daerah	1.875.000	0,32 %	4.481.893	0,80 %	4.475.950	0,55 %	6.345.947	0,63 %	24,30 %
Retribusi Daerah	28.830.000	4,95 %	1.197.034	0,21 %	3.615.831	0,46 %	4.525.000	0,51 %	-40,49 %
Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	400.000	0,07 %	-	0,00 %	-	0,15 %	100.000	0,00 %	100,00%
Lain-lain PAD yang Sah	8.895.000	1,53 %	13.350.596	2,39 %	5.530.489	1,27 %	16.152.219	0,78 %	-11,20 %
Dana Perimbangan	478.809.920	82,18 %	515.823.977	92,43 %	637.471.136	88,72 %	785.927.019	89,53 %	7,42 %
Bagi Hasil Pajak		0,00 %		0,00 %	8.081.920	1,62 %	785.927.019	89,53 %	7,42 %
Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	78.929.070	13,55 %	39.516.026	7,08 %	38.169.152	4,44 %	33.773.025	3,36 %	-25,78
Dana Alokasi Umum	361.491.540	62,04 %	408.687.131	72,23 %	409.259.640	67,50%	469.784.133	57,48 %	3,15 %
Dana Alokasi Khusus	38.389.310	6,59 %	67.620.820	12,12 %	190.042.140	15,17 %	282.369.861	26,69 %	49,16 %
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	63.852.448	10,96 %	23.229.861	4,16 %	60.889.754	8,85 %	56.028.337	8,55 %	1,18 %
Pendapatan Hibah		0,00 %	0,00 %	0,00 %	-	0,00 %	-	0,00 %	
Dana Darurat		0,00 %	0,00 %	0,00 %	-	0,00 %	-	0,00 %	
Dana Bagi Hasil Pajak Propinsi dan Pemerintah Daerah		0,00 %		0,00 %	10.745.858	8,04 %	10.745.858	1,51 %	
Dana Penyesuaian dan Otonomi Daerah		0,00 %		0,00 %	32.364.740	0,00 %	32.364.740	4,55 %	
Bantuan Keuangan dari Propinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya		0,00 %		0,00 %	-	0,00 %	-	0,00 %	
Dana Desa							17.779.156	2,50%	

kecil nilai rasio ini, semakin baik rasio kewajiban terhadap ekuitas, karena menunjukkan kemampuan pemerintah daerah untuk membayar kewajibannya.

BAB IV

NILAI MANAJEMEN KEUANGAN ISLAM KABUPATEN KEPULAUAN SULA 2016

Dalam mengklasifikasikan manajemen keuangan Daerah pada pembiayaan di Kabupaten Kepulauan Sula ke dalam kelompok lima kebutuhan dasar dalam perspektif pembiayaan manajemen keuangan Islam (kebutuhan agama/keimanan, kebutuhan jiwa, kebutuhan akal, kebutuhan keturunan dan kebutuhan harta), peneliti mengelompokkannya dari bidang dan unit organisasi anggaran pembiayaan daerah.

Pada dasarnya mengukur kesehatan keuangan Daerah adalah bagaimana cara kita berkomitmen untuk melaksanakan apa yang telah direncanakan dalam *planning*, *organisation*, *cordinating* dan *controlling*, jika kita tidak bisa komitmen terhadap keuangan daerah, maka keuangan daerah dalam keadaan sakit, jika kita dapat melaksanakan perencanaan keuangan sesuai yang kita rencanakan, maka keuangan daerah kita dalam keadaan sehat.

Untuk lebih jelas persentase alokasi anggaran keuangan untuk semua unit, peneliti menuangkannya pada penjelasan dibawah ini;

A. Pembiayaan Manajemen Keuangan Untuk Pemeliharaan Agama

1. Manajemen pembiayaan agama keuangan Islam dan APBD Kabupaten Kepulauan Sula

dibandingkan dengan anggaran perencanaan pemenuhan nilai kebutuhan agama dalam penguatan perencanaan pembiayaan manajemen keuangan Islam sebesar Rp. 293.950.555.763,14,- (dua ratus sembilan puluh tiga milyar, sembilan ratus lima puluh juta, lima ratus lima puluh lima ribu, tujuh ratus enam puluh tiga koma empat belas rupiah) atau 33.3%, terdapat selisih sebesar 32,9 %.

2. Nilai *planning* manajemen keuangan pemeliharaan agama

Nilai *planning* manajemen keuangan dalam perencanaan pembiayaan daerah menggunakan konsep manajemen keuangan Islam, bukan berarti kepentingan penduduk non-muslim yang hidup di daerah tersebut diabaikan. Tujuan *planning* manajemen keuangan Islam adalah untuk kesejahteraan semua penduduk, bukan orang perorang atau kelompok tertentu saja. Karena keadilan bersifat universal, maka pemerataan manajemen pembiayaan pun diperuntukan untuk kesejahteraan penduduk. Jika di suatu komunitas non-muslim yang padat penduduknya tidak memiliki sarana ibadah, maka pemerintah setempat bertanggung jawab atas pembangunan sarana ibadah tersebut, karena ibadah merupakan kebutuhan tiap pemeluk agama dan hak asasi semua manusia.

Dalam segi perencanaan, baik manajemen perencanaan anggaran pada APBD Kabupaten Kepulauan Sula maupun perencanaan manajemen anggaran dalam pembiayaan Islam. APBD Kabupaten Kepulauan Sula terlalu kecil untuk keuangan pembiayaan agama. Perencanaan manajemen pembiayaan nilai penguatan agama pada manajemen pembiayaan keuangan Islam ini dapat mencukupi kebutuhan keagamaan masyarakat di Kabupaten Kepulauan Sula.

nilai-nilai kepedulian. Manakala nilai telah berhasil ditransformasikan, maka hal itu menjadi penggerak masyarakat dalam mencapai kondisi ideal.

Dari penjelasan teori dan data pembiayaan nilai *organizing* penguatan agama tersebut, dipahami bahwa organisasi manajemen anggaran pembiayaan keuangan daerah Kabupaten Kepulauan Sula dalam pemenuhan nilai manajemen untuk penguatan pembiayaan keagamaan agama di daerah terlalu kecil, bila dibandingkan dengan manajemen pembiayaan keuangan dalam Islam.

4. Nilai *coordinating* manajemen keuangan pemeliharaan agama

Nilai manajemen *coordinating* keuangan pada pemenuhan pembiayaan keagamaan, pemerintah daerah (eksekutif, legislatif maupun yudikatif) dapat berkordinasi dalam kerjasamanya, karena manajemen anggaran keuangan keagamaan ini tidak hanya diperuntukan untuk penganut agama Islam saja, tapi juga untuk penganut agama lain yang diakui oleh undang-undang. Kordinasi pada besaran pemeliharaan untuk agama lain diserahkan kepada anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang disesuaikan dengan jumlah pemeluk agama tersebut dan kebutuhannya, tidak bisa disamakan alokasi dana pemeliharaan agama untuk umat Islam yang mayoritas dengan umat agama lain yang minoritas.

Dilihat dari kenyataan yang ada, manajemen keuangan pada pembiayaan pemeliharaan agama relatif kecil karena pemerintah daerah lebih fokus pada pembangunan infrastruktur, bukan berarti bahwa pemerintah daerah tidak memperhatikan pembiayaan nilai agama, tetapi karena Kabupaten Kepulauan Sula merupakan daerah otonomi baru lebih fokus pada

Manajemen keuangan untuk pembiayaan pemeliharaan jiwa langsung digunakan dalam proyek dan unit organisasi yang sama, seperti rumah sakit, pertanian, perikanan polisi pamong praja, dan unit lainnya, dimana tugas mereka sama untuk melayani semua anggota masyarakat baik muslim maupun non muslim.

2. Nilai *planning* manajemen keuangan pemeliharaan jiwa

Nilai manajemen anggaran keuangan penguatan pemeliharaan jiwa sifatnya umum karena dapat digunakan untuk kepentingan semua agama yang ada di Kabupaten Kepulauan Sula, manajemen keuangan pembiayaan untuk nilai penguatan pemeliharaan jiwa APBD Kabupaten Kepulauan Sula tahun 2016 sebesar Rp. 236.572.819.653,22,- (dua ratus tigapuluh enam milyar, lima ratus tujuh puluh dua juta, delapan ratus sembilan belas ribu, enam ratus limapuluh tiga koma duapuluh dua rupiah), atau 26.8%. Bila dibandingkan dengan nilai penguatan perencanaan manajemen keuangan pembiayaan kebutuhan jiwa dalam perencanaan manajemen keuangan Islam sebesar Rp. 234.807.350.849,84,- (dua ratus tigapuluh empat milyar, delapan ratus tujuh juta, tiga ratus limapuluh ribu, delapan ratus empat puluh sembilan koma delapan puluh empat rupiah) atau 26,6%.

Dilihat dari perencanaan manajemen keuangan, baik manajemen perencanaan keuangan daerah maupun manajemen perencanaan keuangan Islam, terdapat selisih yang sangat kecil dari jumlah nilai kedua manajemen keuangan pembiayaan penguatan kebutuhan jiwa, baik APBD Kabupaten Kepulauan Sula dan nilai manajemen keuangan pembiayaan Islam untuk

Dari penjelasan teori dan data, nilai penguatan pembiayaan pemeliharaan jiwa tersebut pada pengorganisasian manajemen keuangan daerah dapat di pahami bahwa manajemen keuangan pembiayaan Kabupaten Kepulauan Sula untuk pemeliharaan penguatan jiwa dalam pembiayaan sejalan dengan teori untuk perbaikan masyarakat. Ini menunjukkan pemenuhan pembiayaan nilai penguatan kebutuhan hidup dan jiwa setiap individu warga masyarakat adalah sama, baik beragama Islam maupun beragama non-Islam, jadi tidak ada masalah dalam pengalokasian pembiayaan dana tersebut, dan alokasi pembiayaan keuangan pun tidak usah dibedakan seperti pada anggaran pemeliharaan agama.

4. Nilai *coordinating* manajemen keuangan pemeliharaan jiwa

Dalam perencanaan manajemen keuangan pembiayaan tahunan kebutuhan dasar manajemen keuangan pembiayaan Kabupaten Kepulauan Sula, mekanisme dan proses penjangkauan *coordinating* diutamakan untuk mendapatkan informasi pembiayaan secara jelas pada bagian porsi pembiayaan dasar anggaran sebagai bagian dari upaya pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran program yang ditetapkan dalam rencana strategis daerah Kabupaten Kepulauan Sula. Dalam proses koordinasi kebijakan keuangan pada anggaran pembiayaan dijadikan payung bagi eksekutif khususnya unit kerja dalam menyusun kebijakan anggaran tahunan daerah. Dalam penyusunan rencana kerja masing-masing program dapat memuat secara lebih rinci uraian mengenai nama program, tujuan dan sasaran program output yang akan dihasilkan sebagai program pembangunan prioritas kesejahteraan masyarakat.

Yang ada laporan realisasi anggaran keuangan, Kita harus melihat bagaimana realisasi anggaran dalam 1 tahun, apakah surplus atau defisit. Realisasi anggaran ini tergantung dari seberapa besar realisasi anggaran SKPD, seberapa cepat SKPD menjalankan program pemerintah. Pembiayaan anggaran tergantung seberapa cepat realisasi anggaran SKPD dari dinas terkait dalam menjalankan program pemerintah.

Menurut M. Umer Capra³²⁹ teori kemaslahatan manajemen keuangan Islam untuk penguatan akal yaitu; “Kemaslahatan itu sejalan dengan kehendak syara’ dan termasuk dalam jenis kemashlahatan yang didukung *nash* secara umum”.

Dilihat dari data manajemen keuangan daerah penjelasan imformen pada pembiayaan nilai penguatan akal dan teori yang ada, dipahami bahwa organisasi manajemen keuangan pembiayaan untuk nilai kebutuhan penguatan akal sangat besar untuk ukuran Kabupaten Kepulauan Sula. Dalam kelembagaan daerah pengorganisasian anggaran pembiayaan penguatan akal sifatnya umum karena dapat digunakan untuk kepentingan semua agama, ada beberapa sektor perlu diperhatikan sesuai dengan agamanya masing-masing, seperti lembaga pendidikan pesantren, lembaga pendidikan Islam atau seminari untuk umat Kristiani, ini pun disesuaikan dengan kebutuhan dan jumlah penduduk.

Tujuan manajemen keuangan pemeliharaan akal tersebut sifatnya umum, ada beberapa sektor yang penuh perhatian dalam pengaturan keuangan yang sifatnya spesifik dalam Islam, maka koordinasi anggaran pada sektor-sektor penting tersebut sangat penting dalam sebuah perencanaan keuangan.

Tujuan keuangan sangatlah beragam, tujuan keuangan seperti bagaimana kita

³²⁹ M. Umer Chapra, *Islam dan Tantangan Ekonomi*, “terj” Ikhwan Abidin Basri (Jakarta: Gema Insani Press, 2000), 287.

Meskipun demikian, memprediksi kondisi keuangan pemeliharaan akal pada saat ini, jangan hanya melihat pada kondisi perekonomian saat ini saja tetapi juga konsekuensi dan risiko yang dihadapi pada tiap alternatif pengelolaan anggaran keuangan daerah Kabupaten Kepulauan Sula. Hidup ini penuh dengan pilihan dan setiap pilihan dalam hidup mempunyai efek positif maupun negatif. Setiap keputusan yang diambil oleh pemerintah daerah mempunyai konsekuensi tertentu, maka pemahaman mengenai efek yang akan terjadi dari keputusan keuangan yang diambil terhadap bagian dari kehidupan menjadi penting. Disinilah butuh pertimbangan nilai-nilai moral keagamaan dalam setiap keputusan yang menjadi kebijakan pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Sula.

5. Nilai *controlling* manajemen keuangan pemeliharaan akal

Dari data dan penjelasan informen, dipahami bahwa; nilai pengawasan keuangan pada pembiayaan yang dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Sula untuk pembiayaan nilai penguatan pemeliharaan akal patut diacungi jempol dengan anggaran pembiayaan yang dikururkan, walaupun dalam manajemen anggaran pembiayaan nilai penguatan akal pada pembiayaan keuangan Islam terdapat selisih perbedaan 114.755.472.220,26,-. Selisih inilah yang menimbulkan sentisifitas pada tataran pengawasan dan kebijakan, karena sebahagian keuangan pembiayaan untuk nilai pembiayaan yang lain telah tersodot, dan dilain sisi pembiayaan tersebut banyak yang belum menyentuh pada tataran aplikasinya.

Controlling pembiayaan keuangan manajemen penguatan akal di Kabupaten Kepulauan Sula dalam bidang pendidikan dan kebudayaan sudah

sejalan dengan prosedur keuangan, tetapi dalam tataran aplikasi pengembangan pendidikan di daerah yang kurang menyentuh sasaran, sebagaimana dikatakan oleh bapak Ketut, yaitu :³³¹

Pendidikan kurang, ini di akibatkan oleh dampak dari pelkada langsung, karena dengan pelkada langsung ini maka di anggap para tenaga pengajar baik kepala sekolah maupun guru-guru adalah orang yang paling dekat dengan masyarakat dan pemilih sehingga mereka dimanfaatkan dalam kepentingan politik, ada yang terlibat dalam tim sukses, inilah yang merusak simpul-simpul pendidikan di daerah. Kepala sekolah, guru sudah terlibat dalam tim sukses akhirnya anak didik pun juga dilibatkan, sehingga tugas belajar mengajar itu terganggu. Dan pada saat Bupati terpilih tentunya ada kepala sekolah, ada guru yang berbeda pilihan itu juga menjadi korban.

Dari penjelsan tersebut dapat di pahami bahwa setiap pembiayaan pada item anggaran dalam pengawasan anggaran pembiayaan pemerintah daerah lambat dalam menindaklanjuti pengawasan keuangan pembiayaan penguatan pemeliharaan akal, menyebabkan indikasi penyalahgunakan wewenang yang dapat menyebabkan kekurangan fasilitas, sarana dan prasarana pendidikan. Pengawasan anggaran pembiayaan untuk nilai penguatan pemeliharaan akal di Kabupaten Kepulauan Sula perlu di telaah lagi. Meningkatkan pengawasan sesuai dengan manajemen keuangan pembiayaan nilai penguatan akal yang ada pada manajemen keuangan pembiayaan Islam, pengawasan mengutamakan mendeteksi unsur para pimpinan agar standar keuangan pembiayaan yang ada pada waktu mengerjakan berjalan sesuai kontrol pengawasan.

Pengawasan anggaran daerah yang dilakukan secara umum adalah dengan melakukan pemeriksaan maksimum setidak-tidaknya setiap enam

³³¹ I.Ketut Suparjana, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kepulauan Sula, *Wawancara*, tanggal 21 Juli 2016.

bulan sekali. Tujuan pengawasan manajemen keuangan pembiayaan daerah oleh pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Sula, kemungkinan anggaran keuangan tidak semestinya berjalan, faktor penyebab sebuah perubahan karena perubahan gaya hidup atau budaya mamperkaya diri sendiri dan keadaan sekitar atau peristiwa di luar kendali seperti inflasi atau perubahan pasar saham juga dapat mempengaruhi pengawasan pada perencanaan keuangan.

Akuntabilitas nilai publik dalam pengawasan keuangan pembiayaan daerah adalah kewajiban pihak pemegang amanah dalam mengawasi anggaran daerah, DPRD sebagai pengawasan publik masyarakat untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Sula yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban pada organisasi sektor publik, khususnya pemerintah daerah, hubungan ini muncul antara pemerintah daerah sebagai pemegang keuangan dan DPRD sebagai principal dan publik/warga berlaku sebagai prinsipal yang memberikan otoritas kepada DPRD untuk mengawasi kinerja pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Sula. Akuntabilitas menjadi suatu konsekuensi nilai-nilai moral yang logis yang menjembatani adanya hubungan penyelenggara dan pengawasan terhadap keuangan daerah.

D. Pembiayaan Manajemen Keuangan Untuk Pemeliharaan Keturunan

1. Manajemen pembiayaan keturunan keuangan Islam dan APBD Kabupaten Kepulauan Sula

JUMLAH

Rp. 11.475.547.221,984,- 100

Nilai manajemen keuangan pembiayaan untuk penguatan pemeliharaan keturunan APBD Kabupaten Kepulauan Sula tahun 2016 sebesar Rp. 11.475.547.221,984,- (sebelas milyar, empat ratus tujuh puluh lima juta, lima ratus empatpuluh tujuh ribu, dua ratus duapuluh satu, koma sembilan delapan empat rupiah) atau 1,3% dari total APBD Kabupaten Kepulauan Sula.

Bila dibandingkan dengan nilai penguatan manajemen keuangan pembiayaan pemeliharaan keturunan dalam Islam sebesar Rp. 117.403.675.424,92,- (seratus tujuh belas milyar, empat ratus tiga juta, enam ratus tujuh puluh lima ribu, empat ratus duapuluh empat koma sembilanpuluh dua rupiah) atau 13,3%.

2. Nilai *planning* manajemen keuangan pemeliharaan keturunan

Nilai *planning* manajemen anggaran keuangan pembiayaan untuk penguatan anggaran pemeliharaan keturunan, pada paparan data ini terlihat bahwa, keuangan perencanaan pada manajemen keuangan pembiayaan untuk nilai penguatan pemeliharaan keturunan baik dalam APBD Kabupaten Kepulauan Sula maupun pada manajemen pembiayaan Islam terdapat selisih perbedalan 12% atau 105.928.128.202,93,- untuk APBD Kabupaten Kepulauan Sula dalam keuangan Islam tahun 2016, kebijakan anggaran pembiayaan untuk nilai penguatan pemeliharaan keturunan APBD Kabupaten Kepulauan Sula tahun 2016 terlalu kecil untuk kebutuhan masyarakat Kabupaten Kepulauan Sula.

3. Nilai *organizing* manajemen keuangan pemeliharaan keturunan

Di dalam Dokumen Penggunaan Anggaran (DPA) itu merupakan dana rencana kerja dari Bupati dan wakil Bupati selama satu priode/lima tahun, dan dijabarkan pada setiap tahun. Dana kita ini cukup kecil, kalau kita bagikan dengan belanja pegawai hamper setengah dari anggaran dari Alokasi Umum kita untuk membiayai belanja pegawai. Jadi sisanya itu kita bagi-bagikan berdasarkan kebutuhan SKPD yang mendasar, selama kebutuhan itu tertuang dalam dokomen penggunaan anggaran maka kita merealisasikannya, jika tidak ada dalam dokumen anggaran maka kita tidak bisa merealisasikannya.

Pengawasan sebagai alat untuk menetapkan penghargaan, penyeleksian pada suatu nilai kerja, dan kompensasi berdasarkan suatu prestasi pada kinerja anggaran manajemen nilai keturunan yang sebenarnya, dari pada berdasarkan perkiraan kinerja anggaran tentang unsur perilaku kinerja keuangan bawahannya.

Pada pengawasan manajemen anggaran keturunan dalam pengawasan nilai perencana keuangan perlu melakukan analisis dan evaluasi atas informasi yang diperoleh untuk menentukan situasi keuangan daerah saat ini dan menentukan nilai pembiayaan keturunan untuk mencapai tujuan keuangan daerah. Pada tahap ini perencanaan keuangan melihat kekuatan dan kelemahan status keuangan daerah Kabupaten Kepulauan Sula dan menganalisis bahaya atau risiko potensial yang mungkin dapat menghalangi pencapaian tujuan keuangan daerah. Pengawasan yang dilakukan termasuk analisis aset, kewajiban dan arus kas, serta investasi yang telah dilakukan. Hal ini tergantung dari jenis pelayanan yang diinginkan oleh pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Sula. Pengawasan pembiayaan pada nilai keturunan perencanaan keuangan dapat menilai apakah tujuan keuangan pembiayaan nilai keturunan realistis atau tidak. Jika tidak sesuai dengan nilai keadilan, disarankan untuk mengubah perencanan keuangannya secara bersama-sama

keuangan konvensional, maka yang pertama disusun adalah keuangan anggaran pembiayaan/belanja, dengan pendapatannya belum ada, kemudian pendapatan disesuaikan dengan neraca anggaran pembiayaan/belanja tahun berikutnya sehingga memungkinkan terjadinya defisit anggaran dikarenakan pendapatan/pemasukan keuangan belum diterima dan baru perkiraan saja. Berbeda dengan rencana manajemen anggaran pembiayaan Islam, harta dikumpulkan dan dicatat terlebih dahulu dan disimpan di baitul maal kemudian pemerintah membuat manajemen keuangan untuk pembiayaan dengan mengambil harta tersebut dari baitul maal untuk memenuhi kebutuhan pemerintah.

Nilai *planning* dalam sistem anggaran manajemen keuangan Islam, pendapatan dahulu yang diambil dan dicatat kemudian baru menyusun anggaran pembiayaan sesuai dengan pemenuhan kebutuhan dasar yaitu; pemeliharaan agama, jiwa, akal, kehoramtan (keturunan) dan pemeliharaan harta yang disesuaikan dengan dana yang ada, sehingga kemungkinan terjadinya defisit anggaran sangat kecil, karena anggaran pembiayaan disesuaikan dengan manajemen keuangan dana yang sudah ada.

Nilai *planning* inilah yang menjadi pembeda dan kesulitan, karena manajemen keuangan rencana pembiayaan daerah secara konvensional sudah berlangsung lama hingga sekarang. Manajemen keuangan anggaran pembiayaan disusun dan ditetapkan terlebih dahulu, sambil berjalan pembiayaan daerah diambil/dikumpulkan dari pos-pos keuangan daerah atau negara untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan daerah atau negara.

guna (*efficiency*) kegiatan daerah. Tata cara organisasi pengurusan keuangan daerah harus sedemikian rupa memungkinkan setiap program direncanakan dan dilaksanakan untuk mencapai tujuan dengan biaya serendah-rendahnya dengan hasil yang maksimal”.

Dilihat dari data manajemen keuangan pembiayaan pemeliharaan harta dan teori tersebut, terungkap bahwa; *organizing* pada manajemen keuangan daerah pada keuangan pembiayaan penguatan harta dalam APBD Kabupaten Kepulauan Sula untuk nilai penguatan pemeliharaan harta ini terlalu kecil, bila dibandingkan dengan nilai *organizing* manajemen pembiayaan pemeliharaan harta dalam manajemen keuangan Islam terdapat selisih perbedaan 5,1% atau 45.019.454.486,248. Ini mengindikasikan bahwa keuangan organisasi daerah tidak dapat mencapai hasil guna (*effectiveness*) dan daya guna (*efficiency*) kegiatan daerah yang efektif. Nilai anggaran pada manajemen pembiayaan penguatan pemeliharaan harta dalam APBD Kabupaten Kepulauan Sula tahun 2016 terlalu kecil untuk kebutuhan masyarakat Kabupaten Kepulauan Sula.

Dalam pembiayaan manajemen keuangan Islam, pemerintah juga menggunakan teori keuangan pendapatan dan belanja negara/daerah (APBN/APBD) untuk mengendalikan pembiayaan pemerintah, yang disesuaikan dengan jumlah pendapatannya. Namun biasanya, penyesuaian manajemen keuangan daerah Kabupaten Kepulauan Sula dilakukan pada bagian pengeluaran dan bukan bagian pendapatan. Tujuan dari adanya konsep anggaran pemerintah daerah adalah menopang tujuan yang ingin dicapai oleh pemerintah daerah. Sementara tujuan pokok manajemen anggaran pemerintah

daerah dalam Islami adalah memaksimalkan kesejahteraan jasmani dan rohani seluruh warga masyarakat/negaranya dengan tidak mengabaikan prinsip-prinsip keadilan, amanah dan kejujuran.

4. Nilai *coordinating* manajemen keuangan pemeliharaan harta

Coordinating anggaran manajemen keuangan pada penguatan nilai harta lebih intensif, mengingat manajemen *coordinating* keuangan pembiayaan pada nilai penguatan pemeliharaan harta di Kabupaten Kepulauan Sula fokus pada keuangan pembiayaan agar hasil guna dan daya guna APBD Kabupaten Kepulauan Sula kedepan mencapai hasil yang maksimal, mengingat pemeliharaan harta ini juga penting, karena di dalamnya terdapat pengelolaan dana asset daerah, pertambangan dan energi, perindustrian dan perdagangan, serta bidang pekerjaan umum.

Jadi nilai *coordinating* perencanaan manajemen keuangan itu merupakan proses, proses yang berkelanjutan untuk bekerja sama dengan masyarakat dalam menentukan dan mencapai tujuan-tujuan keuangan masyarakat dan akan dievaluasi dan disesuaikan dengan tujuan daerah secara profesional, dan lingkungan bisnis, serta perubahan kondisi ekonomi.

Pandangan Islam, pemerintah adalah pemegang amanah Allah untuk menjalankan tugas-tugas kolektif dalam mewujudkan kesejahteraan dan keadilan (*al adl wal ihsan*) serta tata kehidupan yang baik (*hayyah thayyibah*) bagi seluruh umat. Jadi pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Sula adalah agen dari Tuhan atau khalifatullah untuk merealisasikan falah. Sebagai pemegang amanah Tuhan, eksistensi dan peran pemerintah dalam

Audit internal, bahwa setiap pengeluaran uang yang berupa belanja rutin atau belanja modal pemerintah daerah itu disesuaikan dengan dokumen pendukung. Kemudian Audit Internal yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah, dilakukan paling sedikit 3 (tiga) bulan sekali dan setiap semester 6 (enam) bulan sekali. Dan setiap tahun sekali dilakukan sebelum BPK masuk mengaudit pemerintah daerah, maka telah dilakukan Audit internal terlebih dulu, tujuannya untuk memperbaiki, melakukan koreksi-koreksi sebelum dilakukan oleh BPK agar terhindar dari penyimpangan.

Berdasarkan data dan penjelasan informen, dapat disimpulkan bahwa dasar kebutuhan dalam pengawasan anggaran pembiayaan pemerintah daerah pada organisasi atau instansi yang berwenang di Kabupaten Kepulauan Sula yang dipercayakan dapat memperhatikan nilai-nilai keagamaan dan kemanusiaan sebagai prioritas pembangunan yang berkeadilan sosial untuk kebutuhan kesejahteraan masyarakat untuk kemajuan pembangunan daerah dalam memenuhi kebutuhan anggaran pembiayaan daerah.

Ada tiga hal yang dianggap kurang tepat dalam pengelolaan keuangan harta di daerah. *Pertama*, pengelolaan keuangan harta dipisahkan dengan ajaran Islam, seolah-olah Islam tidak mengajarkan bagaimana cara mengelola keuangan dalam harta. *Kedua* tidak memiliki strategi pengelolaan keuangan dalam harta Islami, sehingga sering tidak ditemukan hal-hal yang prinsipil yang seharusnya dipelajari lebih awal, malah terlewatkan, bahkan ini terlihat jelas lagi terlihat implementasi manajemen anggaran keuangan daerah dalam harta yang dianggapnya sebagai puncak atau inti agama, maka Islam seakan diidentikan dengan paham keagamaan yang bersifat dikotomi. *Ketiga* kurangnya penjelasan yang luas dan mendalam serta kurangnya penguasaan simantik dan generik atas istilah-istilah kunci dan pokok dalam ajaran agama sehingga sering ditemukan penjelasan yang sangat jauh dan berbeda dari makna yang sebenarnya. Hal semacam inilah yang membuat umat Islam

terkadang kaku dalam menjalankan syariat Islam, bahkan syariat Islam dianggap suatu hal yang memberatkan, ini semua akibat dari cara penyampaian ajaran Islam yang kurang tepat, padahal kalaulah semua umat Islam mengetahui bahwa ajaran Islam adalah ajaran yang universal yang menyangkut kebahagiaan dunia dan akhirat keselamatan dunia dan akherat, hal ini sebenarnya yang diinginkan oleh semua orang.

Pengawasan pada manajemen keuangan harta di Kabupaten Kepulauan Sula, keuangan daerah dijadikan sebagai peningkatan kinerja dan menjadi motifasi yang merangsang untuk mencapai prestasi kinerja keuangan daerah yang lebih baik, sehingga pengawasan tersebut mampu menjelaskan sampai sejauh mana orang-orang akan diukur dan diberi suatu kesempatan untuk mengukur efektifitas yang mereka miliki. Kinerja pengawasan pada manajemen keuangan pemeliharaan harta daerah dijadikan sebagai media komunikasi yang mencakup konsep-konsep syariah pada umumnya untuk membicarakan kemajuan organisasi manajemen anggaran keuangan daerah.

Manajemen keuangan daerah Kabupaten Kepulauan Sula dan manajemen keuangan berdasarkan Islam, bila kedua manajemen keuangan tersebut berkolaborasi dapat memunculkan nilai-nilai manajemen keuangan yang bernilai moral tinggi, memunculkan nilai keadilan, nilai amanah dan nilai kejujuran yang signifikan secara parsial atas karakteristik manajemen keuangan yang berkharismatik terhadap kinerja aparat pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sula.

Proses anggaran manajemen keuangan publik dapat dilihat dari proses-proses yang terjadi di birokrasi dan lembaga politik termasuk representasi warga. Bagaimana

mengatakan sebuah alur pembiayaan akuntabel sama saja dengan memotret bagaimana mekanisme teknokratis di birokrasi dapat dilakukan sesuai dengan standar alokasi dan manajemen keuangan yang berlaku di satu sisi. Sementara di sisi yang lain, proses teknis dan teknokratis dapat dijamin tetap berdiri di atas semua kepentingan keuangan politik, aspirasi publik serta mampu dipertanggungjawabkan baik secara administratif maupun secara ekonomi dan pembangunan politik. Dengan demikian manajemen keuangan dapat dengan mudah diklaim telah dilakukan melalui mekanisme perencanaan yang partisipatif, akomodatif, adil dan representatif secara politik. Akan tetapi dengan tetap memperhatikan terpenuhinya aspek-aspek administrasi keuangan yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan standar keuangan daerah dan mendukung pertanggungjawaban aspek-aspek kinerja keuangan pembiayaan publik.

Pengelolaan manajemen keuangan daerah bertumpu pada kepentingan publik (*public oriented*). Hal tersebut tidak hanya terlihat dari besarnya pengalokasian keuangan pembiayaan untuk kepentingan publik, tapi juga terlihat dari besarnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan daerah yang sejalan dengan kejelasan visi misi daerah Kabupaten Kepulauan Sula dalam pengelolaan keuangan daerah pada umumnya dan manajemen keuangan pembiayaan daerah pada khususnya.

Manajemen keuangan daerah Kabupaten kepulauan Sula dalam penyusunan anggaran keuangan banyak keragaman dari aktor yang terlibat dalam proses keuangan, berbeda dan sering kali beradu motivasi, tujuan dan kepentingan. Eksekutif daerah berkepentingan memperluas cakupan institusinya dan memperbesar budget bagi pelaksanaan program dan kegiatannya. Sementara legislatif daerah berkepentingan

agar dapat terpilih kembali (*reelection*) dengan memperbanyak yang diperbuat bagi daerah pemilihannya. Untuk dapat memenuhi hal tersebut, anggota legislatif mencari program dan kegiatan yang membuatnya dapat populer di mata konstituen. Salah satu bentuk kegiatan program adalah belanja investasi pada sektor infrastruktur.

Pada pemetaan manajemen keuangan daerah Kabupaten Kepulauan Sula, bisa saja Eksekutif terbagi menjadi dua kelompok, yaitu kelompok pro dan kontra. Kelompok eksekutif yang pro menginginkan manajemen keuangan pembiayaan berbasis kinerja, sehingga keuangan pembiayaan dapat digunakan secara efektif dan efisien, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta disusun berdasarkan nota kesepakatan yang telah ditetapkan. Sebaliknya pada kelompok eksekutif yang kontra, menginginkan manajemen keuangan pembiayaan yang besar (*maximizing budget*) bagi insitusinya dengan mengabaikan segala ketentuan dan kesepakatan yang telah ditetapkan sebelumnya. Harapannya bahwa dengan memaksimalkan keuangan pembiayaan, maka semakin banyak pula program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada institusi mereka, secara otomatis dapat meningkatkan *income* bagi personil-personilnya.

Penyusunan manajemen keuangan pembiayaan daerah Kabupaten Kepulauan Sula, dilihat pada sisi legislatif juga akan terjadi pengelompokan kepentingan. Pada sisi politisi yang pro lebih mementingkan jumlah anggaran, sehingga semakin banyak proyek-proyek yang dilaksanakan, pada akhirnya dapat memuaskan konstituen mereka di daerah pemilihan masing-masing. Sementara pada politisi yang kontra menginginkan agar keuangan pembiayaan dapat terdistribusi secara proporsional, amanah, kejujuran yang berkeadilan.

Bila dilihat secara seksama terkait dengan pembahasan manajemen keuangan pembiayaan, kompromi dapat menghasilkan alternatif tawaran, antara lain pemindahan lokasi kegiatan/lokasi proyek, pengurangan dan penghapusan suatu kegiatan dan menggantinya dengan kegiatan baru serta dapat juga berupa persetujuan untuk merevisi volume pekerjaan.

Nilai-nilai yang mempengaruhi pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Sula dalam perumusan kebijakan manajemen keuangan publik, yaitu :

1. Nilai-nilai politik, yaitu keputusan dibuat atas dasar kepentingan politik dari parpol atau kelompok kepentingan tertentu di daerah Kabupaten Kepulauan Sula. Realitas politik dalam pembuatan kebijakan manajemen keuangan publik di daerah tidak boleh dilepaskan dari fokus kajiannya, sebab apabila kebijakan publik keuangan daerah melepaskan kenyataan politik, maka kebijakan publik keuangan daerah yang dihasilkan akan miskin aspek lapangannya. Kebijakan publik manajemen keuangan itu sendiri tidak pernah steril dari aspek politik. Proses formulasi kebijakan pada manajemen keuangan dipahami sebagai proses pengambilan keputusan yang sangat ditentukan oleh faktor kekuasaan.
2. Nilai-nilai Organisasi, dalam hal ini keputusan-keputusan manajemen keuangan daerah Kabupaten Kepulauan Sula dibuat atas nilai-nilai yang dianut organisasi, seperti balas jasa (*rewards*) dan sanksi yang dapat mempengaruhi anggota organisasi untuk menerima dan melaksanakannya. Pada tataran ini, tindakan yang dilakukan oleh para stakeholders lebih dipengaruhi dan termotivasi oleh kepentingan serta perilaku kelompok, sehingga pada gilirannya produk-produk kebijakan manajemen keuangan

Kabupaten Kepulauan Sula yang dihasilkan mengakomodir kepentingan organisasi ketimbang mewakili kepentingan publik secara keseluruhan.

3. Nilai-nilai pribadi, yaitu sering kali keputusan manajemen keuangan daerah Kabupaten Kepulauan Sula dibuat atas dasar nilai-nilai pribadi yang dibuat oleh pribadi pembuat keputusan untuk mempertahankan *statusquo*, reputasi, kekayaan, dan sebagainya. Proses formulasi kebijakan manajemen keuangan daerah dalam konteks ini lebih dipahami sebagai suatu proses yang terfokus pada aspek emosional manusia, personalitas, motivasi dan hubungan interpersonal.
4. Nilai-nilai Kebijakan, dalam hal ini keputusan manajemen keuangan daerah Kabupaten Kepulauan Sula dibuat atas dasar persepsi pembuat kebijakan, yang secara moral dapat dipertanggungjawabkan. Termasuk dalam kategori ini adalah nilai moral, keadilan, kemerdekaan, kebebasan, kebersamaan, dan lainnya. Pandangan ini melihat bagaimana pembuat kebijakan manajemen keuangan sebagai personal yang mampu merespon stimulasi dari lingkungannya. Artinya dapat terlihat bahwa kebijakan pada manajemen keuangan pembiayaan daerah yang membijaksanai kebijakan manajemen keuangan pada permasalahannya, menentukan pilihan manajemen keuangan dari berbagai alternatif yang ada, memproses informasi manajemen keuangan dan mengkomunikasikan informasi manajemen keuangan dalam organisasi.
5. Nilai Ideologi, nilai ideologi seperti budaya lokal, adat istiadat, nilai moral keagamaan dan nilai nasionalisme dapat menjadi landasan pembuatan kebijakan manajemen keuangan pada keuangan daerah Kabupaten Kepulauan Sula, baik kebijakan daerah maupun kebijakan nasional. Selain itu nilai-nilai

Dari hasil paparan dan analisis data dalam penelitian ini, sesuai dengan teori dan analisis interdisipliner penguatan nilai manajemen keuangan Islam pada sistem manajemen keuangan daerah, dapat disimpulkan sebagai berikut;

Pertama, Manajemen keuangan daerah di Kabupaten Kepulauan Sula dilakukan secara efektif dan efisien dengan melibatkan seluruh elemen dan stakeholder mulai dari perencanaan ekonomi sampai monitoring dan evaluasi sebagai acuan nilai untuk menyusun anggaran sesuai dengan pemenuhan kebutuhan dasar daerah.

Kedua, Penguatan nilai manajemen keuangan Islam pada sistem manajemen keuangan daerah Kabupaten Kepulauan Sula, terwujud dalam bentuk pembiayaan agama, jiwa, akal, keturunan dan harta menanamkan nilai-nilai keadilan, amanah dan kejujuran demi tercapainya tujuan pemerintah yaitu untuk mensejahterakan rakyat sesuai dengan motto dan visi misi daerah, lebih lugas dalam ungkapan operasional "keadilan sosial". Hal ini sudah sejalan dengan teori masalah dalam manajemen keuangan Islam. Atau dengan ungkapan lain manajemen keuangan Islam dan manajemen keuangan daerah saling memperkuat dalam hal *planning*, *organisation*, *cordinating* dan *controlling*.

B. Implikasi Teoretis

Dari kesimpulan di atas, dapat dikatakan bahwa penelitian ini menemukan hasil bahwa nilai manajemen keuangan Islam pada kebutuhan dasar agama, jiwa, akal, keturunan dan harta sudah diterapkan di daerah Kabupaten Kepulauan Sula, padahal nilai manajemen anggaran keuangan pada umumnya tidak berlandaskan nilai Islam seperti keadilan, amanah dan kejujuran. Hal ini bertolak belakang dengan kebijakan

2. Pada bagian data lapangan, penelitian ini terbatas pada wilayah Kabupaten Kepulauan Sula Maluku Utara, belum mencapai wilayah-wilayah yang ada di Indonesia, karena wilayah tersebut sangat representatif untuk dilakukan penelitian.
3. Penelitian ini dilakukan di Sanana sebagai Ibu Kota Kabupaten Kepulauan Sula pada masa awal pemekaran Kabupaten Pulau Taliabu, pecahan dari Kabupaten Kepulauan sula tahun 2013, dan manajemen keuangan pada anggaran pembiayaan setelah pemekaran tahun 2013-2016. Keterbatasan studinya adalah penelitian ini belum melakukan eksplorasi data secara lebih mendalam pada priode sebelumnya (2005-2013).

D. Rekomendasi

Sesuai dengan hasil penelitian, implikasi teoretis, dan keterbatasan studi penelitian ini, penulis memberikan rekomendasi, khususnya kepada para peneliti lanjutan, sebagai berikut:

1. Penelitian lanjutan tentang masalah manajemen keuangan daerah, khususnya keuangan Kabupaten Kepulauan Sula dapat dikembangkan pada pendalaman primer Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 dan Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 untuk anggaran daerah yang berorientasi kepada pembiayaan pemenuhan lima kebutuhan dasar dalam perspektif manajemen keuangan Islam dapat meningkatkan kualitas hasil penelitian.
2. Penelitian lanjutan tentang masalah manajemen keuangan daerah, khususnya keuangan daerah Kabupaten Kepulauan Sula, dapat dikembangkan pada

periode-periode akan datang. Hal ini, dimaksudkan untuk penataan pembiayaan anggaran daerah terkait dengan kondisi konteks pengembangan daerah untuk memperbaharui APBD harus didukung dengan peraturan daerah, untuk itu, peraturan pemerintah daerah sesuai dengan pemenuhan nilai-nilai dasar kemanusiaan kebutuhan dalam Islam,

3. Penelitian lanjutan tentang manajemen keuangan pembiayaan daerah ke depan dalam penyusunan APBD dari perkembangan yang terjadi selama pelaksanaan otonomi daerah, sistem dan nilai-nilai APBD telah mengalami perubahan pembiayaan daerah yang dapat terukur baik kinerja maupun jumlah kebutuhannya.

Untuk itu, pembiayaan daerah merupakan perwujudan dari kebijakan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan yang berbentuk kualitatif. Olehnya itu kebijakan pembiayaan pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula Maluku Utara diprioritaskan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah dan ditujukan untuk hal-hal sebagai berikut: a) Peningkatan efektifitas penanggulangan kemiskinan; b) Pemerataan Pembangunan dan Pemantapan Infrastruktur; c) Peningkatan aksesibilitas dan kualitas pelayanan pendidikan; d) Peningkatan aksesibilitas dan kualitas pelayanan kesehatan; e) Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan dan peningkatan pelayanan publik; f) Peningkatan pertumbuhan ekonomi dengan menciptakan kemandirian kerja dan perluasan lapangan kerja; g) Meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat dan upaya pemenuhan kebutuhan dasar sarana dan prasarana pelayanan masyarakat; h) Meningkatkan alokasi anggaran pada bidang-bidang yang langsung

- Basri, Faisal, Haris Munandar. *Lanskap Ekonomi Indonesia. Kajian dan Renungan Terhadap Masalah-masalah Struktural, Transformasi Baru, dan Prospek Perekonomian Indonesia*.
- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2016-2021*.
- Chapra, M. Umer, *Islam dan Tantangan Ekonomi*, Penerjemah Ikhwan Abidin Basri, (Jakarta: Gema Insani Press, 2000).
- , *Masa Depan Ilmu Ekonomi*, (Jakarta : Gema Insani Press, 2001).
- Cil, Zaki Fuad, *Pemerataan Distribusi Kekayaan dalam Ekonomi Islam*, (Jakarta: Rajawali Press, 2009).
- Carl Joachim Friedrich, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, (Bandung: Nuansa dan Nusamedia, 2004).
- C.S. George Jr. *The History of Management Thought*, ed. 2nd. (Upper Saddle River, NJ. Prentice. 1972).
- Dwiyanto, Agus, *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2008).
- Dwiyanto, Agus, dkk. *Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia*. (Yogyakarta: Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan Universitas Gadjah Mada, 2002).
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, (Bandung: Lubuk Agung, 1989).
- Djazuli, H. A. dan I. Nurol Aen, *Ushul Fiqh (Metodologi Hukum Islam)* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000).
- Deliarnov, *Perkembangan Pemikiran Ekonomi*, (Jakarta: Penerbit Rajawali Press, 2007).
- Diana, Heny F., Analisis Kinerja Atas Laporan Keuangan Pemerintah Propinsi Sumatera Selatan. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 2008 <http://smartaccounting.files.wordpress.com/2011/03/perbandingan-indikator-kinerja-keuangan-pemerintah-propinsi-se-sumatra-bag-selatan.pdf>. Vol. 14 No. 8. Diakses tanggal 03 januari 2015. 193-229.
- Devas, Nick, *Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia* (Jakarta: UI Press, 1989).
- Dewi, Elita, "Identifikasi Sumber Pendapatan Asli Daerah Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah", dalam *Jurnal Univertitas Sumatra Utara*, 22 Juni 2002.

- Dessler Gary. *Human Resource Management*. (New York: McGraw-Hill. Series In Management, 2011).
- Dunya, Syauqi Ahmad, *Al-Iqtishad al-Islami*, (Makah: Rabithah Alam Islami, tahun 1990), (penerjemah) Ahmad Shodiq Noor, *Sistem Ekonomi Islam*, Cet. 1. (Jakarta, Fikahati Aneska, 1994).
- Djumhana, Muhammad, *Pengantar Hukum Keuangan Daerah*, (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2007).
- Eriyatno. *Ilmu Sistem: Meningkatkan Mutu dan Efektivitas Manajemen* (Bogor: IPB Press, 1999).
- Fauzan, Muhammad, *Hukum Pemerintah Daerah; Kajian Tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah*, (Yogyakarta: UII Press, 2006).
- Granovetter, M., "Problem of Explanation in Economic Sociology", dalam *Network and organizations: Structure from and Action*, ed. N. Nohria et al. (Boston: Harvard Businnes School Press, 1992).
- al-Ghazali, Abu Hamid, *Syifa' al-Ghalil fi Bayan al-Syabah wa al-Mukhil al-Ta'lil*, tahqiq Ahmad al-Kabisi, (Baghdad: Mathbah al-Irsyad, 1971).
- , *al-Mustasfa min Ilm al-Usul*, (Kairo: al-Amiriyah, 1412).
- Griffin, R. *Business*, 8th Edition. (NJ: Prentice Hall. 2006).
- Ghafar, Muhammad Abdul Mun'im, *al-Iqtishad al-Islami: al-Iqtishad al-juz'1 Jilid 3* (Irak: Dar al-Bayan, 1985).
- Gafur, Abdul, *Kebijakan Ekonomi di Masa Pemerintahan Khalifah Umar*, <http://gavouer.wordpress.com/2011/03/02/kebijakan-ekonomi-di-masa-pemerintahan-khalifah-umar-bin-khattab/> Diakses 11 Juni 2016 pukul 16:58 WIT.
- Halim, Abdul dan Theresia Damayanti, *Pengelolaan Keuangan Daerah*. (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2007).
- HR, Syaukani, dkk, *Otonomi Daerah dalam Negara Kesatuan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002).
- Herdiansyah, *Kualitas Pelayanan Publik (Konsep, Dimensi, Indikator, dan Implementasinya)*, (Yogyakarta: Gava Media, 2011).
- Hasan, Suad dan Enny Pudjiastuti, *Dasar-dasar Manajemen Keuangan*, (Yogyakarta: UUP AMP YKPN, 199).
- Haryono, Bambang Santoso, dkk. *Capacity Building*. (Malang: UB Press, 2012).

- Haroen, H. Nasrun, *Ushul Fih I* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997).
- Hartono, Arif, *Agenda Lanjutan Pasca Institutional Zakat*, dalam UNISI, No. 41/XXII/IV/20.
- Hasibuan, Malayu S.P., *Manajemen Sumber Daya Manusia*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2013).
- <http://www.sabili.co.id/>, Zakat dalam Keuangan Publik Islam, diakses 02 September 2016.
- <http://www.Pkesinteraktif.com>, *Keuangan Publik Islam*, di akses 02 September 2016.
- akses tanggal 17 maret 2017.
- Hafiduddin, Didin, "Pembangunan Ekonomi Umat Berbasis Zakat", dalam http://fai.uhamka.ac.id/viewcat.php/cal_id=4 , di akses 02 September 2016.
- Huda, Nurul, dkk., *Keuangan Publik Islam: Pendekatan Teoritis dan Sejarah*, (Jakarta: Kencana, 2012).
- Iqbal, Munawar (ed.), *Distributive Justice and Need Fulfilment in on Islamic Economy*, "Introduction", 1988.
- IPB dan BAZNAS, *Potensi Zakat Indonesia Tahun 2010*, Hasil Penelitian IPB dan BAZNAS tahun 2010.
- Iqbal, Zamir dan Abbas Mirakhor, *Pengantar Keuangan Islam, Teori dan Praktek*. Terjemahan oleh A.K. Anwar, (Jakarta: Kencana Press, 2008).
- al-Juwaini, Abd al-Malik ibn Yusuf Abu al-Ma'ali, *Al-Burhan fi Usul al-Fiqh*, (Kairo: Dar al-Ansar, 1400 H).
- Karim Adiwarmar Azwar, *Ekonomi Mikro Islami*, (Jakarta: IIIT Indonesia, 2002).
- , *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006).
- Karinga, Hendra, *Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Keuangan Daerah*, (Bandung: PT Alumni, 2011).
- Khusaini, Muhamad, *Ekonomi Publik: Desentralisasi Fiskal dan Pembangunan Daerah*, (Malang : BPFE Unbraw, 2006).
- Kaho, Josef Riwu, *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003).

- Khan, M. Fahim, *Essays in Islamic Economics*, Islamic Economic Series-19, (The Islamic Foundation, 1995/ 1415 H).
- Kajian Akademis Organisasi Pengelola Keuangan Daerah, *Reformasi Organasasi Pengelolaan Keuangan Daerah*, Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum Departemen Dalam Negeri, 2009.
- Lamnek, Siegfried. *Qualitative Sozialforschung*. Lehrbuch. 4. Auflage. Beltz Verlag. Weihnhein, Basel, 2005.
- Lindawati, Tita, *Kemampuan Keuangan Daerah Pemerintah DKI Jakarta dalam melakukan pinjaman*. Tesis S2 (Tidak dipublikasikan) (Yogyakarta, Pasca Sarjana UGM, 2001).
- Ledgerwood, Joanna, *Microfinance Handbook: An Institutional and Financial Perspective*. (New York: The World Bank, 2007).
- Lubis, Nur A. Fadhil, *Hukum Islam dalam Kerangka Teori Fikih dan Tata Hukum Indonesia*, (Medan: Pustaka Widyasarana, 1995).
- LKPJ Akhir Masa Jabatan Bupati Kepulauan Sula, Tahun 2010-2015.
- al-Maliki, Abdurrahman, *Politik Ekonomi Islam*, Penerjemah: Ibnu Sholah, (Bangil : Al-Izzah, 2001).
- Martono dan D. Agus Harjito, *Manajemen Keuangan*, Edisi Pertama (Yogyakarta: Ekorisia, 2002).
- Mahmudi, *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah* (Yogyakarta: STIM YKPN. 2010).
- Muhammad, *Dasar-dasar Keuangan Islami*, (Yogyakarta: EKONESIA FE-UH, 2004).
- , *Manajemen Bank Syari'ah*, edisi Revisi, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2005).
- , *Ekonomi Islam, Kontribusi Fondamentalisme Islam Untuk Ekonomi Islam*, (Malang: Empatdua, 2009).
- Mannan, Muhammad Abdul, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, terj. M. Nastangin (Yogyakarta: PT Dana Bakti Wakaf, 1995).
- , *Ekonomi Islam, Teori dan Praktek*, pent. Potan Arief Harhap, (Jakarta: Intermedia, 1992).
- Mas'udi, Masdar F., "Meletakkan Kembali Maslahat Sebagai Acuan Shari'ah" *Jurnal Ilmu dan Kebudayaan Ulumul Qur'an* No.3, Vol. VI Th. 1995).

- Mas'ud, Muhammad, *Sejarah Pemikiran dan Peradaban Islam Masa Dinasti Umayyah*,
<http://muhammadmasud.staff.stainsalatiga.ac.id/2013/10/02/sejarah-pemikiran-dan-peradaban-islam-masa-dinasti-umayyah/>. Diakses 09 Juni 2016 Pukul 10:30 WIT.
- Masita, Machmud, George Kawung dan Wensy Rompas, Analisis Kinerja Keuangan Daerah Di provinsi Sulawesi utara Tahun 2007-2012. *Jurnal Efisiensi* Volume 14 No. 2 Mei 2014, <http://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jbie/article/download/4181/3710pdf>. Diakses tanggal 01 Maret 2015, 2-11.
- Marnis, *Pengantar Manajemen*, Cet. ke-3 (Pekanbaru: Panca Abdi Nurgama, 2009).
- Manan, Bagir, *Hubungan antara Pusat dan Daerah Menurut Undang–Undang Dasar 1945*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1994).
- , *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, (Yogyakarta: FSH UII Press, 2002).
- Matutu, Mustamin DG. dkk, *Mandat, Delegasi, Atribusi dan Implementasinya di Indonesia*, (Yogyakarta: UII Press, 1999).
- Mardiasmo, *Otonomi & Manajemen Keuangan Daerah*, (Yogyakarta: Penerbit ANDI, 2004).
- , "Otonomi Daerah Sebagai Upaya Memperkokoh Basis Perekonomian Daerah" (Artikel - Th. I - No. 4 - Juni 2002).
- an-Nabhani, Taqyuddin, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif, Perspektif Islam*, Terj. An-Nidham al-Iqtishadi Fil Islam, (Surabaya: Risalah Gusti, 2000).
- Nasution, Mustafa Edwin, dkk. *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2006).
- Nawawi, Ismail, *Isu-Isu Ekonomi Islam : Kompilasi Pemikiran dan Teori Menuju Praktik di Tengah Arus Ekonomi Global. Buku 1 Nalar Filsafat* (Jakarta : Viv Press, 2013).
- , *Metoda Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: VIV, 2014).
- , *Revolusi Pemikiran; Model, Konstruksi Integrasi dan Interkoneksi Keilmuan Islam dan Aplikasi Penelitian*, Cet Ke-2, (Jakarta: VIV Press, 2015).
- , *Manajemen Keuangan Islam*, (Jakarta: VIV, 2013).
- Nordiawan, Deddy, dkk, *Akuntansi Pemerintahan*, (Jakarta : Salemba Empat, 2008).

- Nurcolis, Hanif, *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*, (Jakarta: Grasindo, 2007), 208. Lihat pula Siswanto Sunarno, *Hukum Pemerintahan Daerah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008).
- Nasucha, Chaizi, *Reformasi Administrasi Publik: Teori dan Praktik*, (Jakarta: Grasindo, 2004).
- Purnama, Achmad Rizal, Menuju Sistem Ekonomi Islam, *Makalah Seminar “Membuka Peluang Kewirausahaan Dalam Sistem Ekonomi Islam”* (UI Depok: Desember 2000).
- Prastowo, Dwi dan Rifka Julianti, *Analisis Laporan Keuangan Konsep dan Aplikasi* (Yogyakarta: YPK, 2002).
- Peningkatan Kualitas Belanja Daerah*, (Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, 2013).
- Pasrah, Rudi, Analisis Kinerja dan Kemandirian Keuangan Daerah serta Pengaruhnya terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Sumatera Selatan, *Kajian Ekonomi*, Vol. 6 No.2, 2007, 198-221. <http://rlc.fe.ui.ac.id/pasca/opac/fe/detail.jsp?id=22105&lokasi=lokal>. Diakses tanggal 15 April 2015, 1–14.
- PP No. 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan, PP No. 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah, PP No. 106 Tahun 2000, PP 107 Tahun 2000, PP No. 55 Tahun 2005, PP No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Adrian Sutedi, *Implikasi Hukum Atas Sumber Pembiayaan Daerah Dalam kerangka Otonomi Daerah*, (Jakarta: Penerbit Sinar Grafika, 2009).
- Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan, *Sistem Administrasi Keuangan Daerah I*, (Ciawi: Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, 2011).
- Pamungkas, Bani, *Kebijakan Moneter Masa Awal Islam*, <http://khanaqwa.blogspot.com/2011/06/kebijakan-moneter-fiskal-masa-awal.html>. Diakses 10 Juni 2016 Pukul 14:00 WIT.
- Poerwadarminta, W.J.S., *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2006).
- Pora, Mahyudin, “wawancara”, Kantor Bupati Kabupaten Kepulauan Sula Maluku Utara, tanggal 23 Desember 2015.
- Perda Kabupaten Kepulauan Sula No. 1 tahun 2015 tgl 23 Januari 2015 tentang APBD.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 104 tahun 2010 tentang Dana Perimbangan Bab I Ketentuan Umum pasal 1 ayat 2.

- , *Manajemen Sumber Daya Manusia: Etika dan Standart Profesional Sektor Publik*. (Malang: UB Press, 2011).
- Simatupang, Paula, *Studi Komparasi Evaluasi APBD Kabupaten/Kota di Propinsi Sumatera Selatan*. Tesis (tidak dipublikasikan), (Palembang: Program Pascasarjana Universitas Sriwijaya, 2007).
- Siswanto, *Pengantar Manajemen*, Cet.ke-1, (Jakarta: Bumi Aksara, 2005).
- Sunarno, Siswanto, *Hukum Pemerintah Daerah di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008).
- Sarundajang, *Pemerintahan Daerah di Berbagai Negara*, (Jakarta: Pusataka Sinar Harapan, 2001).
- Sabarno, Hari, *Memandu Otonomi Daerah Menjaga Kesatuan Bangsa*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007).
- Suharso dan Ana Retnoningsih, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Semarang: Widya Karya, 2005).
- Sasana, Hadi, *Analisis Determinan Belanja Daerah di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat Dalam Era Otonomi dan Desentralisasi Fiskal*, <http://Jurnal Bisnis dan Ekonomi>, diakses tanggal 28 Oktober 2016.
- Syamri, Laode, "Pengertian Revenue dan Income", dalam <http://id.shvoong.com/writing-and-speaking/presenting/2061508-pengertian-revenue-dan-income/>, akses 2 Februari 2016, pukul 00.20 WIT.
- Syamsi, Ibnu, *Dasar-dasar Kebijakan Keuangan Negara*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1994).
- Sumitro, Rochmad, *Dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan 1944*, (Bandung: Eresco, 1979).
- Sjamsuddin, Sjamsiar, *Kepemerintahan dan Kemitraan*. (Malang: CV. Sofa Mandiri, 2006).
- Soekarni, Muhamaad, dkk, *Kebijakan Ekonomi Dalam Islam*, (Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2005).
- , *Investasi Syariah, implementasi, Konsep, dan Pernyataan Empirik*, (Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2008).
- Siddiqie, M. Nejatullah, *Muslim Economic Thinking, a survey of contemporary literature*, Jeddah : ICRI Economics King Abdul Aziz University, 1981.
- Suhendi, Hendi, *Fiqh Mu'amalah*, (Jakarta: Rajawali Press, 2008).

Wikipedia Bahasa Indonesia, Ensiklopedia Bebas. “Pembangunan Indonesia” Artikel diakses pada 17 Mei 2016 dari : http://id.wikipedia.org/wiki/Pertumbuhan_ekonomi. Diakses tanggal 2 September 2016.

Widjayakusuma M. Karebet, *Pengantar Manajemen Syariah* (Jakarta: Khairul Bayan, 2003).

Yuwono, Sonny, dkk., *Memahami APBD dan Permasalahannya* (Panduan Pengelolaan Keuangan Daerah). (Malang: Bayumedia Publishing, 2008).

Yaumidin, Umi Karomah, *Sistem Fiskal tanpa Bunga dalam Teori Ekonomi Dalam Islam*, (Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2005).

Yamin, Ilham, Seksi Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Kabupaten Kepulauan Sula, *Wawancara*, tanggal 19 Agustus 2016.

Zoulkem, *Kebijakan Fiskal dan Moneter Pertengahan Islam*, <http://zoulkem.wordpress.com/2010/01/14/kebijakan-fiskal-dan-moneter-pertengahan-islam/> Diakses 09 Juni 2016 Pukul 15:28 WIT.

